



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI
SERDANG**

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025**





SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan Perubahan Kebijakan Umum (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada angka 4 huruf b, bahwa Pemerintah Daerah segera menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Wali kota terpilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program jangka panjang daerah.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra – PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan disingkat Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berisi program, kegiatan dan subkegiatan suatu Perangkat Daerah (PD) serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah :
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ditujukan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB III
PERUBAHAN RKPD
Pasal 3

Perubahan RKPD mengacu pada:

- a. hasil evaluasi pelaksanaan rkpD tahun berjalan sampai dengan triwulan 1 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah;
- b. kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025;
- d. penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; dan
- e. perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD meliputi:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI PENUTUP.

(2) Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Kepala Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 05 Juni 2025

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 05 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

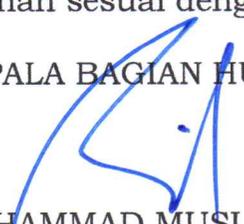
Ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

KATA PENGANTAR

Perubahan RKPD merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan.

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 mengalami berbagai dinamika terkait dengan perubahan kondisi yang ada, diantaranya penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer lainnya yang menyebabkan perubahan berbagai target dan sasaran pembangunan tahun 2025. Hal tersebut, tentunya berdampak pada perubahan RKPD Tahun 2025. Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Deli Serdang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi seperti perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pemerintah pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025. Perubahan yang dilaksanakan dalam Program/Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025, diantaranya berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan baru, penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun dengan tetap menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Lubuk Pakam, Juni 2025

Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen	I-8
BAB. II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1 Evaluasi Capaian Program Pembangunan.....	II-1
2.1.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029	II-2
2.1.2 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	II-7
2.1.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	II-12
2.1.4 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-35
2.1.5 Evaluasi Berdasarkan Kinerja dan Anggaran .	II-45
2.1.6 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	II-49
2.1.7 Faktor Penghambat Capaian Kinerja.....	II-49
2.1.8 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	II-50
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-51
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	II-51
2.2.2. Identifikasi Permasalahan.....	II-52
2.2.3. Perumusan Isu Strategis Daerah pada Perubahan RKPD 2025	II-55
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Global	III-2
3.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional	III-3

3.1.3	Kondisi Ekonomi Sumatera Utara.....	III-4
3.1.4	Kondisi Ekonomi Deli Serdang.....	III-6
3.1.5	Kondisi Dan Prospek Penanaman Modal/ Investasi di Kabupaten Deli Serdang.....	III-8
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
3.2.1	Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-13
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-21
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-28
3.3	Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah	III-37
3.3.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	III-37
3.3.2	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).....	III-37
3.3.3	Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	III-38
BAB. IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.	IV-2
4.1.3	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.....	IV-10
4.1.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang	IV-18
4.2	Target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.....	IV-27
4.2.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Deli Serdang	IV-27
4.2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Deli Serdang	IV-28
4.2.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-30
4.3	Kegiatan Strategis Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.....	IV-41
4.4	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dan Provisni Sumatera Utara	IV-46

BAB. V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025	V-1
5.2	Pendanaan Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	V-25
5.3	Pendanaan Dukungan Prioritas Nasional Tahun 2025	V-28
5.4	Pendanaan Dukungan Prioritas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	V-30
5.5	Pendanaan Dukungan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan.....	V-31
5.6	Dukungan Pendanaan Penanggulangan Pengangguran Tahun 2025	V-41
5.7	Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Nasional Penanggulangan Stunting Tahun 2025.....	V-42
5.8	Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Nasional Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	V-52
BAB. VI	PENUTUP.....	VI-1

LAMPIRAN

Evaluasi RKPD TW I Tahun 2025.....	Lamp.1
RKPD Perubahan Tahun 2025	Lamp.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja IKU	II-2
Tabel 2. 2	Realisasi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Triwulan I Tahun 2025.....	II-3
Tabel 2. 3	Capaian IKU Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang s.d Triwulan I Tahun 2025.....	II-9
Tabel 2. 4	Capaian IKD Deli Serdang Triwulan I Tahun 2025	II-13
Tabel 2. 5	Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan.....	II-37
Tabel 2. 6	Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan	II-38
Tabel 2. 7	Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	II-41
Tabel 2. 8	Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan...	II-43
Tabel 2. 9	Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-45
Tabel 2. 10	Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial	II-47
Tabel 2. 11	Rata-rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	II-49
Tabel 2. 12	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-62
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Empat Tahun Terakhir (2020 s/d 2024)	III-16
Tabel 3.2	Struktur Pendapatan pada RKPD 2025, APBD 2025, Realisasi Triwulan I 2025 dan Proyeksi pada P-RKPD 2025	III-18
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir (2020 s/d 2024)	III-23
Tabel 3.4	Struktur Belanja pada RKPD 2025, APBD 2025, Realisasi Triwulan I 2025 dan Proyeksi pada P-RKPD 2025	III-25
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2020 s/d 2024)	III-30
Tabel 3.6	Struktur Pembiayaan pada RKPD 2025, APBD 2025, Realisasi Triwulan I 2025 dan Proyeksi pada P-RKPD 2025	III-32

Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2020 s/d 2024)	III-34
Tabel 3.8	Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada P-RKPD 2025	III-36
Tabel 3.9	Dasar Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	III-40
Tabel 4.1	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.....	IV-10
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ..	IV-12
Tabel 4.3	Sasaran Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	IV-17
Tabel 4.4	Tujuan, Sasaran, Indikator dan targetnya pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.....	IV-23
Tabel 4.5	Indikator Makro Kabupaten Deli Serdang pada P-RKPD Tahun 2025	IV-27
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Deli Serdang pada P-RKPD Tahun 2025	IV-29
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Deli Serdang pada P-RKPD Tahun 2025	IV-31
Tabel 4.8	Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara.....	IV-47
Tabel 5. 1	Jumlah Program pada RKPD 2025, APBD 2025 dan P.RKPD 2025	V-18
Tabel 5. 2	Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 2025, APBD 2025 dan P.RKPD 2025.....	V-21
Tabel 5. 3	Jumlah Pagu Anggaran pada APBD 2025 dan P.RKPD 2025	V-25
Tabel 5.4	Dukungan Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional	V-29
Tabel 5.5	Dukungan Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2025	V-33
Tabel 5.6	Program Penanggulangan Pengangguran Tahun 2025.....	V-41

Tabel 5.7	Program Penanggulangan Stunting Tahun 2025	V-43
Tabel 5.8	Dukungan Pendanaan Program terhadap Pencapaian SPM	V-52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025	IV-3
Gambar 4.2	Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-4
Gambar 4.3	Misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029	IV-19
Gambar 5.1	Prioritas Nasional Tahun 2025-2029.....	V-29

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026. Namun, dalam pelaksanaannya, RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi serta ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya seperti terbitnya kebijakan/ regulasi baru yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga daerah. Kebijakan/ regulasi baru yang diterbitkan pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer berpengaruh terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,.

Memperhatikan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Serta mengingat Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025-2030 dengan periode RPJMD 2025-2029, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dibutuhkan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 guna menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program unggulan kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden, dengan mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya, Perubahan RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. Bagi perangkat daerah, perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2025 serta Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD) Tahun 2025.

Substansi perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 berpedoman kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 serta mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan perubahan RKPD tahun 2025 menyesuaikan dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih serta memperhatikan dan mempertimbangkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis dan responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan yang disusun konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 di Kabupaten Deli Serdang antara lain adanya dinamika dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Deli Serdang Triwulan I Tahun 2025, meliputi:

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden.
2. Penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah di Kabupaten Deli Serdang khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi.

3. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
4. Penyesuaian penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
5. Penyesuaian penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.
6. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.
7. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2025

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Perumusan Rancangan Perubahan RKPD;
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
- d. Penetapan Perubahan RKPD.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang

- pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1104);

24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045;
2. Perubahan RKPD ini memperhatikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, dengan memedomani terhadap arah kebijakan pada periodenisasi dokumen RPJPN (Asta Cita) dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045;
3. Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (PPAS) yang selanjutnya untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah tahunan yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan program Asta Cita Presiden, serta kondisi dan perkembangan keadaan pada tahun berjalan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 untuk pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan Asta Cita Presiden ;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, produktif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media (*pentahelix*);
4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan;
5. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
6. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025.
7. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
8. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.
9. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025.
10. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

11. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB. II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian Program Pembangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di setiap tahunnya. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta adanya umpan balik terhadap kebijakan tersebut. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efektif dan efisien. Berdasarkan Permendagri tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menjadi dasar dilakukannya Perubahan RKPD.

Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2025 dan sebagian telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025. Proses ini sangat strategis dalam penyesuaian dan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasilnya akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target program/ kegiatan/ sub kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD Penetapan Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 305 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup

sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKP yang digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam RKP kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/kota. Penilaian ini menggunakan skala nilai realisasi kinerja. Adapun kriteria skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja IKU

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Secara umum, terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut masih mencantumkan capaian tahun 2024, belum dapat disajikan data triwulan I tahun 2025.

2.1.1 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Indikator makro pembangunan merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan.

Pada dokumen RKP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) target indikator makro pembangunan yang telah ditetapkan, namun belum tersedia data realisasi hingga triwulan I tahun 2025, sehingga data realisasi yang digunakan merupakan data tahun 2024, kecuali untuk indikator Inflasi yang sudah tersedia hingga Maret 2025. Sejak bulan Januari 2024, perhitungan inflasi Kabupaten Deli Serdang tidak lagi mengacu pada inflasi

Kota Medan melainkan telah mengacu pada inflasi Kabupaten Deli Serdang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 2 Realisasi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Deli Serdang
Triwulan I Tahun 2025**

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Realisasi Tahun 2023 (Baseline)	Realisasi Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 s/d TW I	Status Capaian	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,16	77,56	77,40 - 77,90	n/a	Belum tercapai	BPS Kab. Deli Serdang (2025)
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,36	5,00 - 5,21	n/a	Belum tercapai	BPS Kab. Deli Serdang (2025)
3	Inflasi	%	2,19	1,80	2,5 ± 1	1,24	Belum tercapai	BPS Kab. Deli Serdang (2025)
4	Persentase penduduk miskin	%	3,44	3,44	3,61 - 3,40	n/a	Belum tercapai	BPS Kab. Deli Serdang (2025)
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,62	8,02	7,70 - 6,80	n/a	Belum tercapai	BPS Kab. Deli Serdang (2025)
6	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,52	3,74	3,58	n/a	Belum tercapai	BPS Kab. Deli Serdang (2025)
7	Rasio Gini / Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,295	0,262	0,260	n/a	Belum tercapai	BPS Kab. Deli Serdang (2025)

**(2025), Capaian 2024, Publikasi BPS Maret 2025*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator makro, masih 1 (satu) indikator makro yang tersedia realisasi triwulan I nya, yakni inflasi pada Maret 2025 sebesar 1,24 persen atau masih belum tercapai dari target tahun 2025 sebesar 2,5±1 persen. Sedangkan 6 (enam) indikator belum tersedia data realisasi triwulan I. Hal tersebut, dikarenakan beberapa indikator makro belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I dan diukur secara tahunan atau belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sehingga belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Terlihat juga, beberapa target indikator makro perlu penyesuaian dikarenakan telah tercapai/terlampaui pada tahun 2024, sehingga perlu ada peningkatan target kinerja pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Serta perlu ada penambahan indikator makro pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 guna menselaraskannya dengan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, yaitu: indikator PDRB per kapita, kontribusi kab/kota terhadap provinsi dan penurunan gas rumah kaca.

Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren kenaikan (2020 capaian sebesar 76,11 dan meningkat menjadi 77,56 pada tahun 2024) sehingga pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat sejalan dengan implementasi program unggulan di bidang Sumber Daya Manusia/ Sehat Masyarakatnya (diantaranya melalui : pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Deli Serdang memang menunjukkan tren peningkatan yang menjanjikan. Namun, untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan, beberapa tantangan krusial harus dihadapi.

Di sektor kesehatan, fokus utamanya adalah mewujudkan program kesehatan yang komprehensif. Ini mencakup pencegahan penyakit yang lebih efektif, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan agar merata hingga pelosok, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan fasilitas yang memadai. Lebih dari itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat menjadi fondasi utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Pada dimensi pendidikan, tantangan terbesar adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih lanjut. Hal ini penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya dalam aspek standar hidup layak, kuncinya terletak pada pemerataan peningkatan daya beli masyarakat. Di tengah potensi fluktuasi ekonomi dan ancaman inflasi, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keharusan. Ini berarti perlunya kebijakan yang inklusif agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk.

- b) Laju Pertumbuhan Ekonomi juga menunjukkan tren kenaikan (2020 capaian sebesar -1,78 dan meningkat menjadi 5,36 pada tahun 2024) sehingga pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat sejalan dengan implementasi program unggulan di bidang Ekonomi/ Sehat Ekonominya (diantaranya melalui: pemberdayaan UMKM, kemudahan izin dan usaha). UMKM merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangan dalam pemberdayaan UMKM adalah bagaimana memastikan program pemberdayaan tetap berkelanjutan, dengan mencakup akses permodalan yang lebih mudah dan beragam, peningkatan kualitas produk dan inovasi yang adaptif serta perluasan akses pasar baik secara *online* maupun *offline*.

Program kemudahan izin dan usaha dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dimana tantangannya adalah memastikan implementasinya benar-benar memangkas birokrasi yang berbelit dan menciptakan iklim investasi yang transparan dan prediktif. Proses perizinan harus cepat, jelas, dan tanpa pungutan liar. Selain itu, upaya ini harus diimbangi dengan promosi aktif potensi investasi Deli Serdang kepada calon investor, baik domestik maupun asing, serta memastikan ketersediaan lahan dan infrastruktur pendukung yang memadai.

Saat ini, sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar PDRB Deli Serdang. Meski positif, ketergantungan yang terlalu besar pada satu sektor bisa menjadi risiko jika terjadi guncangan ekonomi atau perubahan permintaan global. Tantangannya adalah bagaimana mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial lainnya secara lebih agresif, seperti pertanian (dengan nilai tambah), pariwisata (terutama ekowisata dan agrowisata), serta sektor jasa yang relevan.

- c) Inflasi, selama lima tahun terakhir terlihat relative terkendali, sehingga pada tahun 2025 juga diproyeksikan terkendali, sejalan dengan perhatian pemerintah daerah dan dukungan pusat untuk menjaga ketersediaan dan harga terhadap barang-barang yang memberikan dampak inflasi, diantaranya melalui operasi pasar murah, peningkatan produktivitas cabe, dan lain-lain.

Komoditas penyumbang inflasi Deli Serdang bulan Desember tahun 2024 yaitu sigaret, emas perhiasan, daging ayam ras, minyak goreng, ikan dencis, bawang putih, telur ayam ras, bawang merah, mie dan ikan nila. Sedangkan faktor pendorong inflasi di tahun 2025 yaitu potensi berlanjutnya kenaikan emas ditengah ketidakpastian global, potensi kenaikan harga komoditas pangan yang berasal dari impor, terutama dipengaruhi oleh perubahan iklim, kondisi geopolitik dan kebijakan proteksi negara produsen.

- d) Persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan (2020 sebesar 3,88 dan menurun menjadi 3,44 pada tahun 2024) sehingga pada tahun 2025 diproyeksikan terus menurun, sejalan dengan perhatian pemerintah daerah dan dukungan pusat untuk menuntaskan kemiskinan, diantaranya melalui pemberian bantuan social, pemberdayaan masyarakat miskin, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat miskin, dan lain-lain.

Beberapa tantangan dalam penurunan kemiskinan yaitu mengentaskan kemiskinan ekstrem yang tersisa, ketimpangan pengeluaran di antara

penduduk miskin yang cenderung lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, memastikan bahwa intervensi pemerintah mampu mengangkat kesejahteraan semua lapisan masyarakat miskin secara adil dan merata, memastikan data yang digunakan untuk penargetan program bantuan sosial atau pemberdayaan ekonomi benar-benar mutakhir, presisi, dan mencakup semua rumah tangga yang berhak. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan multi-sektoral. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan sinergi yang kuat antara berbagai program pemerintah daerah (kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial) dan melibatkan berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) untuk mencapai tujuan penurunan kemiskinan secara holistik dan terpadu.

- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren penurunan (2020 sebesar 9,50 dan menurun menjadi 8,02 pada tahun 2024) sehingga pada tahun 2025 diproyeksikan terus menurun, sejalan dengan perhatian pemerintah daerah dan dukungan pusat untuk membuka lapangan kerja dan usaha, mendorong munculnya wira usaha baru, peningkatan investasi yang padat karya, peningkatan kompetensi calon pencari kerja, dan lain-lain.

Meskipun TPT menurun, namun masih mengalami tantangan. Tantangan dalam penurunan tersebut yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri, keterbatasan lapangan kerja baru, akses informasi lowongan kerja yang terbatas dan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang belum optimal.

- f) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menunjukkan tren peningkatan (2023 sebesar 3,52 dan meningkat menjadi 3,74 pada tahun 2024) sehingga pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat sejalan dengan perhatian pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap peningkatan infrastruktur, khususnya jalan, diantaranya melalui program unggulan jalan utama pasti mantap di Deli Serdang (Jumpa Dia).

Tantangan dalam meningkatkan IDSD yaitu kualitas infrastruktur yang belum merata, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, iklim investasi yang dihadapkan pada tantangan birokrasi yang kurang efisien, kapasitas inovasi di sektor industri dan UMKM Deli Serdang masih terbatas, pengelolaan limbah industri dan rumah tangga yang belum optimal, serta potensi dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur atau industri.

- g) Rasio Gini/Ketimpangan Pendapatan menunjukkan tren penurunan (2020 sebesar 0,312 dan menurun menjadi 0,262 pada tahun 2024) sehingga pada tahun 2025 diproyeksikan menurun sejalan dengan perhatian

pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang juga berpihak terhadap para pelaku usaha kecil/ UMKM.

Mengurangi ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan Indeks Gini, adalah tugas kompleks bagi Kabupaten Deli Serdang. Ketimpangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memicu masalah sosial. Tantangan dalam mengurangi ketimpangan yaitu, kesenjangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial yang berbeda, ektor-sektor dominan mungkin belum sepenuhnya inklusif dalam menyerap tenaga kerja dari semua lapisan masyarakat, terutama dari kalangan berpendidikan rendah atau tanpa keterampilan spesifik, kualitas pendidikan yang bervariasi dan kesenjangan keterampilan, cakupan dan efektivitas jaring pengaman sosial mungkin belum optimal dalam melindungi kelompok miskin dan rentan dari guncangan ekonomi atau kondisi darurat, kesenjangan akses dan literasi digital, efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan dan struktur pajak daerah serta fenomena urbanisasi yang pesat di sekitar Kota Medan dapat menciptakan kesenjangan antara wilayah perkotaan yang lebih maju dengan wilayah pedesaan yang tertinggal.

2.1.2 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Deli Serdang antara lain dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang. IKU Kabupaten Deli Serdang pada RKPD Tahun 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) indikator.

Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Realisasi Kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun hasil capaian IKU Kabupaten Deli Serdang Triwulan II Tahun 2024 berikut dengan kriteria penilaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Capaian IKU Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang
s.d Triwulan I Tahun 2025**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024 (BASE LINE)	TAHUN 2025 (TRIWULAN I)		STATUS CAPAIAN/ KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,56	77,40-77,90	-	Data belum tersedia
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,29	10,30	-	Data belum tersedia
3	Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,40	13,40	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja
4	Umur harapan hidup	Tahun	73,81	73,65	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai/ terlampaui pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,36	5,00-5,21	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai/ terlampaui pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja
6	Rasio Gini	Nilai	0,262	0,260	-	Data belum tersedia
7	Inflasi	%	1,80	2,5±1	1,24	Belum tercapai
8	Nilai PDRB (ADHB)	Triliun	151,45	155,70	-	Data belum tersedia
9	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	Rp. Juta	-	2.828.351	-	<i>Data realisasi investasi PMDN & PMA belum rilis dari Provinsi Sumatera Utara</i>
10		US \$ ribu	-	121.272	-	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,02	7,70-6,80	-	Data belum tersedia, perlu ada penyesuaian dikarenakan realisasi tahun 2024 masih tinggi
12	Persentase kemiskinan	%	3,44	3,61-3,40	-	Data belum tersedia
13	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	Nilai	90,05	82,89	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai/ terlampaui pada tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024 (BASE LINE)	TAHUN 2025 (TRIWULAN I)		STATUS CAPAIAN/ KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	
						sehingga perlu ada peningkatan target kinerja
14	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,74	3,58	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai/ terlampaui pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja
15	Jalan dalam Kondisi baik	%	76,34	77,00	-	Data belum tersedia
16	Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80,04	81,00	-	Data belum tersedia
17	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,13	0,11	-	Data belum tersedia
18	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	78,24	80,50	-	Data belum tersedia
19	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	83,82	88,70	-	Data belum tersedia
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,45	72,50	-	Data belum tersedia
21	Indeks Rasa Aman	Nilai	83,15	81,79	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai/ terlampaui pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja
22	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	80,04	78,90	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai/ terlampaui pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja
23	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	78,75	95,00	-	Data belum tersedia
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	76,36 (BB)	68,00 (B)	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai/ terlampaui pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024 (BASE LINE)	TAHUN 2025 (TRIWULAN I)		STATUS CAPAIAN/ KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	
25	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	-	Data belum tersedia
26	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	71,79	73,00	-	Data belum tersedia
27	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	94	85	-	Data belum tersedia, namun telah tercapai/ terlampaui pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi triwulan I, masih 1 (satu) indikator yang datanya tersedia yaitu: inflasi sebesar 1,24 atau belum tercapai. Sedangkan sebagian besar indikator belum tersedia datanya karena akan diukur/tersedia pada akhir tahun serta beberapa program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung kinerja tersebut belum terealisasi pada triwulan I, namun diproyeksikan pada akhir tahun target kinerja tersebut dapat tercapai. Serta terdapat beberapa target pada RKPD 2025 telah tercapai/terlampau pada tahun 2024 sehingga perlu ada peningkatan target kinerja pada P-RKPD 2025.

2.1.3 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran atau alat untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di suatu daerah. Indikator ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program, kebijakan, dan penggunaan anggaran.

Tabel 2. 4 Capaian IKD Deli Serdang Triwulan I Tahun 2025

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,40-77,90	77,56	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Indikator Makro
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,30	10,29	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
3	Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,40	13,40	Tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
4	Umur harapan hidup	Tahun	73,65	73,81	Tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
5	Rasio Gini / Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,260	0,262	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Indikator Makro
6	Persentase Kemiskinan	Persen	3,61-3,40	3,44	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Indikator Makro
7	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	Nilai	82,89	90,05	Tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
8	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,58	3,74	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Indikator Makro
9	Jalan dalam kondisi baik	Persen	77,00	76,34	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
10	Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	81,00	80,04	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
11	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	0,110	0,135	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
12	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	80,50	78,24	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
13	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	88,70	83,82	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,50	63,45	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
15	Indeks Rasa Aman	Nilai	81,79	83,15	Tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,90	80,04	Tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
17	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	95,00	78,75	Belum tercapai	-	IKU Kabupaten
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	68,00 (B)	76,36 (BB)	Tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
19	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	73	71,79	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85	94	Tercapai	<i>Data Maret 2025</i>	IKU Kabupaten
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,39	67,57	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Ketenagakerjaan
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,00-5,21	5,36	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Indikator Makro
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,70-6,80	8,02	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Indikator Makro
3	PDRB (ADHB)	ADHB/ Triliun	155,70	151,45	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	IKU Kabupaten
4	Inflasi	Persen	2,5±1	1,24	Belum tercapai	<i>Data Maret 2025</i>	Indikator Makro
5	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	PMDN/ Rp. Juta	2.828.351,45	-	Belum tercapai	<i>Data realisasi investasi PMDN & PMA belum rilis dari</i>	IKU Kabupaten
6		PMA/ US \$	121.271,71	-	Belum tercapai		

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
						<i>Provinsi Sumatera Utara</i>	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Urusan Wajib							
A	Terkait Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	86,44	86,43	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	APM SD/MI	Persen	99,81	92,11	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	APM SMP/MTs	Persen	98,92	75,95	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan 7 - 15 Tahun	Poin	100	98,26	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Implementasi Kurikulum	Persen	100	100	Tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Rasio Guru per siswa	Persen	1 : 17	1:18	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Persen	100	68,17	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	100	278.731	Tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	100	13.949	Tercapai	-	Dinas Pendidikan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	59,24	69,10	Tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	50,38	67,43	Tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	67,56	68,65	Tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	66,50	66,54	Tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	41,93	41,1	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Persen	65,82	55,64	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Indeks Iklim Keamanan SD	skor	76,52	71,68	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	skor	78,03	69,51	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Indeks Inklusivitas SD	skor	62,57	56,24	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Indeks Iklim Keamanan SMP	skor	72,41	66,93	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	skor	74,52	68,59	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
	Indeks Inklusivitas SMP	skor	62,61	54,42	Belum tercapai	-	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan						

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase stunting pada balita	Persen	12	0,13	Tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100	98,88	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	100	20,8	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Persen	100	11,15	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	Persen	100	25,59	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Persen	100	10,31	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Persen	98	-	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi paripurna	Persen	97,06	-	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi paripurna	Persen	88	-	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,55	0,47	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	22,86	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	22,86	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	23,48	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Pelayanan kesehatan balita	Persen	100	25	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100	98,88	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	100	5,33	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	100	20,80	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	100	11,15	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persen	100	25,59	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen	100	10,31	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	13,7	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100	12,5	Belum tercapai	-	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Persentase bangunan air dalam kondisi baik	Persen	81,0	76,34	Belum tercapai	-	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Jumlah badan usaha yang tertib	Badan Usaha	15	15	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Jumlah dokumen sistem informasi jasa konstruksi	Dokumen	3	3	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat terampil	Orang	130	116	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat pendampingan pembangunan dan Pengelolaan Gedung Kantor	Persen	100	100	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	Persen	100	71	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persen	60	60	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persen	70	64	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Luas Permukiman Pengembangan System Drainase Kabupaten yang Terlayani	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau	Persen	40,95	-	Belum tercapai	-	IKU Kabupaten
	Persentase Penyediaan/Perbaikan Rumah akibat Bencana Alam/Sosial /Relokasi	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni terjangkau bagi masyarakat	Persen	61,18	-	Belum tercapai	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	0,30	-	Tercapai	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase PSU memadai di kawasan perumahan dan permukiman	Persen	84,50	-	Belum tercapai	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
	Persentase Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Kesejahteraan Rakyat
6	Sosial						
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Sosial
	Persentase Masyarakat yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Sosial
	Persentase Korban bencana yang mendapatkan penanganan	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Sosial
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Sosial
	Persentase Areal Pemakaman yang dikelola	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Sosial

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	Tercapai	-	Dinas Pemadam Kebakaran
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	29,81	Belum tercapai	-	Dinas Pemadam Kebakaran
B	Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja						
	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Persen	100	32,35	Belum tercapai	-	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	76	60,71	Belum tercapai	-	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	87	-	Belum tercapai	-	Dinas Ketenagakerjaan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Persentase keadilan dan kesetaraan gender	Persen	30,96	7,50	Belum tercapai	-	Dinas P3AP2KB
	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	Persen	41,25	10,15	Belum tercapai	-	Dinas P3AP2KB
	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	Persen	100	22,00	Belum tercapai	-	Dinas P3AP2KB
3	Pangan						
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	70	68,5	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
4	Pertanahan	Persen					
	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Persentase peningkatan tertib administrasi pertanahan pemerintah daerah		100	-	Belum tercapai	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Lingkungan Hidup						
	Persentase Ketersediaan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	55	-	Belum tercapai	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	35	-	Belum tercapai	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase kualitas badan air yang memenuhi baku mutu lingkungan	Persen	80	-	Belum tercapai	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu lingkungan	Persen	84	-	Belum tercapai	-	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase Pelaku Usaha Taat Izin PPLH	Persen	40	-	Belum tercapai	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Anugerah Adiwiyata Mandiri	Unit Sekolah	39	-	Belum tercapai	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	-	Belum tercapai	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Sampah / Pengelolaan Sampah	Persen	65	-	Belum tercapai	-	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	18,30	15,60	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Persentase Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan	Persen	90	-	Belum tercapai	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dukcapil	Persen	92	96,75	Tercapai	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase desa cepat berkembang	Persen	55	52,63	Belum tercapai	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase desa mandiri	Persen	5,26	-	Belum tercapai	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	Persen	75	18,74	Belum tercapai	-	Dinas P2KB P3A
	Persentase Partisipasi PUS dalam ber-KB	Persen	71	15,39	Belum tercapai	-	Dinas P2KB P3A
	Persentase Tingkat Pengetahuan Tenaga Pendamping Kelompok Catur Bina	Persen	73	17,54	Belum tercapai	-	Dinas P2KB P3A
9	Perhubungan						
	Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	Persen	72	-	Belum tercapai	-	Dinas Perhubungan
	Persentase titik rawan kemacetan yang tertangani	Persen	71	70	Belum tercapai	-	Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase kendaraan yang berkeselamatan	Persen	81	7	Belum tercapai	-	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika						
	Persentase Pengelolaan layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas	Persen	100	20	Belum tercapai	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Persentase Peningkatan Pengelolaan layanan aplikasi terintegrasi	Persen	100	25	Belum tercapai	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas Binaan	Persen	65,05	6,5	Belum tercapai	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase Koperasi Aktif	Persen	85,33	10,78	Belum tercapai	-	Dinas Koperasi dan UKM
12	Penanaman Modal						
	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	Persen	12,00	-	Belum tercapai	<i>Data realisasi investasi PMDN & PMA belum rilis dari Provinsi</i>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
						<i>Sumatera Utara</i>	
13	Statistik						
	Persentase pengguna data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persen	100	30	Belum tercapai	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14	Persandian						
	Persentase penyelenggaraan Persandian perangkat daerah untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	15	Belum tercapai	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15	Perpustakaan						
	Persentase pengunjung perpustakaan	Persen	14	-	Belum tercapai	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Jumlah perpustakaan aktif	Jumlah	700	187	Belum tercapai	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16	Kearsipan						
	Nilai audit kearsipan internal	Nilai (kategori)	75	63,77	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Nilai audit kearsipan eksternal	Nilai (kategori)	75	79,53	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Perpustakaan dan Arsip
C	Urusan Pilihan						
1	Perikanan						
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	36.100	9.838,88	Belum tercapai	-	Dinas Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	56.100	9.107,52	Belum tercapai	-	Dinas Perikanan
	Persentase Ketersediaan Kawasan Sumber Daya Perikanan yang Terjaga kelestariannya	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Dinas Perikanan
	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Ton	3.200	401,91	Belum tercapai	-	Dinas Perikanan
	Jumlah pemasaran hasil perikanan	Ton	89.500	19.850,74	Belum tercapai	-	Dinas Perikanan
2	Pertanian						
	Peningkatan Jumlah Produksi Padi	Ton	400.253	109.744	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	104.104	20.249	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	6.052	1.188	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	636	45	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Produksi Pisang Barangan	Ton	4.775	990	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Peningkatan Jumlah Produksi Salak	Ton	2.161	1.923	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Produksi Kelapa Sawit (TBS)	Ton	252.460	58.520	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Produksi Kopi	Ton	715	175	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Populasi Sapi	Ekor	140.598	22.635	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Populasi Domba/Kambing	Ekor	185.377	69.006	Belum tercapai	-	Dinas Pertanian
3	Kehutanan						
4	Energi dan Sumber Daya Mineral						
5	Perdagangan						
	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Persen	18	17,79	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Perindustrian						
	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	Persen	32	28,95	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Transmigrasi						
D	Fungsi Penunjang Urusan						
1	Pembinaan dan Pengawasan						

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Fisik Prioritas Perangkat Daerah	Persen	100	25,00	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Administrasi Pembangunan
	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Hukum
	Level Maturitas SPIP	Level	3,2	3,012	Belum tercapai	-	Inspektorat
	Level Kapabilitas APIP	Level	3,3	3,27	Belum tercapai	-	Inspektorat
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level	3,0	2,52	Belum tercapai	-	Inspektorat
2	Perencanaan						
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	80	77,28	Belum tercapai	<i>Data 2024</i>	Bappedalitbang
3	Penelitian dan Pengembangan						
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian yang digunakan dalam rancangan/rumusan kebijakan	Persen	100	100	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Bappedalitbang
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60	60,65	Tercapai	<i>Data 2024</i>	Bappedalitbang
4	Keuangan						
	Peningkatan efisiensi penghematan anggaran dari pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	Persen	6	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yang tepat waktu	Persen	100	33	Belum tercapai	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase aset yang terinventarisasi	Persen	100	100	Tercapai	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	77,5	91,56	Tercapai	-	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	27	18,81	Belum tercapai	-	Badan Pendapatan Daerah
5	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
	Indeks profesionalitas ASN	Poin	74	-	Belum tercapai	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase pelaksanaan Diklat berdasarkan AKD	Persen	80	-	Belum tercapai	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Pendukung KDH dan WKDH						

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase terlaksanannya koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase tercapainya Iuran APKASI dan Iuran FORSESDASI	Persen	100	75	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Tata Pemerintahan
	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kegiatan	1	1	Tercapai	-	Sekretariat Daerah - Tata Pemerintahan
	Persentase kecamatan berkinerja baik	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Tata Pemerintahan
	Persentase realisasi penataan daerah otonomi baru	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Tata Pemerintahan
	Realisasi laporan perencanaan pembangunan daerah	Laporan	3	3	Tercapai	-	Sekretariat Daerah - Tata Pemerintahan
	Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	95	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Organisasi
	Persentase Nilai SKM OPD baik pada Skala Minimal 77,05	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Organisasi

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Terpenuhinya Fasilitas Peralatan dan perlengkapan pada acara acara kedinasan dan organisasi lainnya	Jenis	18	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Umum
	Peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi layanan pengadaan barang/jasa	Kategori	Proaktif	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Tercapainya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Pengadaan Barang dan Jasa
7	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik						
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Kesejahteraan Rakyat
	Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Sekretariat Daerah - Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Penanganan Informasi Potensi Konflik	Persen	95	80	Belum tercapai	-	Badan Kesbangpol
	Persentase Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Persen	100	-	Belum tercapai	-	Badan Kesbangpol

No.	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025	Status Capaian	Keterangan	Perangkat Daerah
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar, Dibina dan Terverifikasi	Persen	87	73	Belum tercapai	-	Badan Kesbangpol

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa belum semuanya data capaian triwulan I tersaji atau masih terdapat data realisasi tahun 2024 dikarenakan data tersebut belum rilis dari BPS atau belum diukur dikarenakan akan diukur pada akhir tahun. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator yang belum tercapai (dari keseluruhan indikator terdapat 33 indikator yang statusnya tercapai atau sekitar 18,03%, dan 150 indikator yang statusnya belum tercapai atau sekitar 81,97%). Capaian kinerja belum tercapai dikarenakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung kinerja tersebut belum terealisasi pada triwulan I, namun diproyeksikan pada akhir tahun target kinerja tersebut dapat tercapai.

2.1.4 Evaluasi Kinerja Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan sehingga menjadi urusan wajib pemerintah untuk melaksanakannya. Standar Pelayanan Minimal meliputi 6 (enam) urusan yaitu:

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Perumahan Rakyat;
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Sosial.

1. Urusan Pendidikan

Realisasi capaian SPM Urusan Pendidikan TW I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	354.994	352.352	<
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	SD:60,86 SMP: 67,31	SD: 69,10 SMP: 68,65	>
		Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	SD: 55,43 SMP: 61,37	SD: 67,43 SMP: 66,54	>
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	22.999	13.949	<
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	-	-	-
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	72.964	63.066	<

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan adalah 100% (seratus persen) dengan kategori Tuntas Paripurna. Namun jika dilihat pada tabel di atas, semua nilai indeks pencapaian urusan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang belum mencapai Tuntas Paripurna. Hal ini dikarenakan data yang tersedia masih merupakan data untuk Triwulan I Tahun 2025, sehingga capaian belum optimal. Untuk mencapai SPM

pendidikan yang optimal, diperlukan upaya bersama antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Peningkatan kualitas pendidik, pemerataan infrastruktur, alokasi anggaran yang memadai, koordinasi yang efektif, dan pemanfaatan data evaluasi menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Deli Serdang.

2. Urusan Kesehatan

Realisasi capaian SPM Urusan Kesehatan TW I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	36.178	8.269	<
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	36.178	8.269	<
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	35.210	8.269	<
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	141.791	35.444	<
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	324.378	320.742	<
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	1.334.335	71.063	<
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	203.811	42.393	<
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	283.019	31.559	<
9	Pelayanan Kesehatan Penderita	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus	30.763	7.873	<

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
	Diabetes Melitus	yang mendapatkan layanan kesehatan			
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	2.909	300	<
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	48.480	6.644	<
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	56.772	7.098	<

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semua indikator belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan data yang tersedia masih merupakan data capaian hingga triwulan I tahun 2025. Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan yang optimal di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025, diperlukan pendekatan strategis dan kolaboratif, diantaranya memperkuat dan mengimplementasikan program-program kesehatan yang bersinggungan dengan masyarakat, mempercepat penurunan stunting, meningkatkan gizi siswa-siswa di sekolah, meningkatkan pelayanan kesehatan lansia dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia, optimalisasi infrastruktur sanitasi dan air bersih serta penguatan monitoring dan evaluasi program kesehatan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas secara terintegrasi dan

melibatkan seluruh elemen masyarakat, diharapkan Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai SPM di bidang kesehatan yang optimal pada tahun 2025.

3. **Urusan Pekerjaan Umum**

Pelayanan dasar yang dilaksanakan urusan pekerjaan umum terbagi 2 (dua) yaitu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan komponen pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut : a. Jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang berdasarkan kepada indikator persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum yaitu melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. b. Jenis pelayanan untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga Negara dan diberikan melalui dua cara yang terdiri dari: 1) Sistem Pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S) yang berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal, jasa layanan sedot tinja dan pembangunan IPLT. 2) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) yang berupa sub-sistem pengolahan terpusat.

Realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum TW I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	79	78,24	<
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,6	83,82	<

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semua indikator belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan data yang

tersedia masih merupakan data capaian hingga tahun 2024, sehingga capaian belum dapat optimal. Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum yang optimal di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan, diantaranya meningkatkan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), optimalisasi pengelolaan sumber daya air, edukasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai pentingnya penghematan air dan cara-cara penggunaan air yang efisien, pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah domestik, mengoptimalkan pelayanan jasa sedot tinja, meningkatkan kapasitas lembaga pengelola air limbah serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai target SPM dalam penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pengolahan air limbah domestik yang optimal pada tahun 2025.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat.

Realisasi capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TW I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	-	<

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program oleh fasilitasi penyediaan rumah yang Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperlayak huni	100	-	<

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semua indikator belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan data yang tersedia masih merupakan data capaian hingga triwulan I tahun 2025, sehingga capaian belum dapat optimal. Untuk mencapai target pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana serta Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025, beberapa langkah strategis dapat diambil, diantaranya pemetaan dan pendataan korban bencana dan relokasi dengan cara menyusun basis data terpadu serta koordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial; perencanaan dan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi, termasuk perencanaan lokasi, desain rumah, dan anggaran yang dibutuhkan; pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif misalnya memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai teknik pembangunan rumah yang aman dan ramah lingkungan serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah korban bencana.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal urusan Trantibumlinmas adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Realisasi capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat TW I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	1.200	300	<
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	95,56	<

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semua indikator belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan data yang tersedia masih merupakan data capaian hingga triwulan I tahun 2025, sehingga capaian belum dapat optimal. Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan Ketentraman, Ketertiban

Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang optimal pada tahun 2025, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, diantaranya mengoptimalkan fungsi Satpol PP, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana dan penanganan situasi darurat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, membangun dan memelihara fasilitas umum seperti penerangan jalan, ruang publik, dan fasilitas olahraga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta memastikan aksesibilitas yang baik ke fasilitas umum untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

6. Urusan Sosial

SPM Urusan Sosial adalah Standar Pelayanan Minimal yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar layanan sosial kepada kelompok rentan dan miskin. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. SPM urusan sosial ini memiliki tujuan utama untuk menjamin pemenuhan hak dasar kelompok rentan secara bermartabat, menurunkan jumlah anak, lansia, disabilitas, dan kelompok sosial lainnya yang terlantar atau tidak mendapatkan akses layanan sosial dasar, dan mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh eksploitasi, kekerasan, atau ketelantaran.

Realisasi capaian SPM Urusan Sosial TW I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh	20	2	<

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2025	Capaian TW I Tahun 2025	Interpretasi: Belum Tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)
	terlantar di luar panti	rehabilitasi sosial diluar panti			
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	14	6	<
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	14	4	<
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	40	10	<
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2.000	-	<

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semua indikator belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan data yang tersedia masih merupakan data capaian hingga triwulan I tahun 2025, sehingga capaian belum dapat optimal. Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Urusan Sosial di Kabupaten Deli Serdang yang optimal pada tahun 2025, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor terkait. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, diantaranya pemetaan dan pendataan kelompok rentan dengan melibatkan instansi terkait; penyediaan layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, dan korban tindak kekerasan; mendaftarkan seluruh warga miskin dan kelompok rentan sebagai peserta PBI BPJS

Kesehatan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang layak; memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya inklusi sosial dan cara mendukung kelompok rentan dalam komunitas mereka serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan sosial untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

2.1.5 Evaluasi Berdasarkan Kinerja dan Anggaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 305 ayat (1) menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup daerah kabupaten/kota. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD

Kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten/kota dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD kabupaten/kota.

Dalam rangka memberikan dorongan serta optimalisasi pembangunan daerah, pengukuran kinerja pembangunan juga dilakukan terhadap Capaian Kinerja per Urusan Pemerintahan Daerah berupa indikator keluaran (*output*) pada program Perangkat Daerah. Dengan menggunakan status capaian indikator tabel di bawah ini, maka pengukuran pencapaian untuk tiap Perangkat Daerah ditandai dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rata-rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE RATA-RATA	
		KINERJA	ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan	9,20	9,20
2	Dinas Kesehatan	7,99	6,29
3	RSUD Drs. H. Amri Tambunan	9,28	9,28

NO.	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE RATA-RATA	
		KINERJA	ANGGARAN
4	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	7,72	4,57
5	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1,74	1,74
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	2,32	2,32
7	Satuan Polisi Pamong Praja	19,11	19,11
8	Dinas Sosial	7,14	5,07
9	Dinas Ketenagakerjaan	8,23	8,23
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,31	2,60
11	Dinas Ketahanan Pangan	5,27	5,13
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,63	3,69
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,08	8,89
14	Dinas Perhubungan	12,12	8,58
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	9,06	4,17
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15,88	10,11
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	13,39	3,35
18	Dinas Perikanan	7,74	7,74
19	Dinas Pertanian	11,17	4,35
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23,11	0,94
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7,83	7,87
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11,94	11,94
23	Inspektorat	23,54	7,67
24	Bappedalitbang	8,74	4,68
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41,21	8,33
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,61	3,25

NO.	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE RATA-RATA	
		KINERJA	ANGGARAN
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20,65	11,14
28	Badan Pendapatan Daerah	31,71	9,27
29	Sekretariat Daerah	14,21	4,65
30	Kecamatan Lubuk Pakam	29,05	5,67
31	Kecamatan Pagar Merbau	46,67	7,94
32	Kecamatan Sunggal	24,02	8,78
33	Kecamatan Percut Sei Tuan	8,81	8,81
34	Kecamatan Biru-Biru	19,75	7,68
35	Kecamatan Bangun Purba	54,29	8,50
36	Kecamatan Batang Kuis	50,00	11,36
37	Kecamatan Deli Tua	27,19	11,61
38	Kecamatan Galang	11,14	11,14
39	Kecamatan Gunung Meriah	60,61	8,64
40	Kecamatan Hamparan Perak	68,83	9,32
41	Kecamatan Kutalimbaru	16,99	9,40
42	Kecamatan Namorambe	33,78	8,42
43	Kecamatan Pancur Batu	47,81	9,40
44	Kecamatan Patumbak	13,87	3,94
45	Kecamatan Sibolangit	46,88	4,39
46	Kecamatan STM Hilir	22,85	8,30
47	Kecamatan STM Hulu	9,00	9,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di atas 19 persen terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja (19,11 persen).
2. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di kisaran $10 \leq 12$ persen terdapat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (11,94 persen), Kecamatan Deli Tua (11,61 persen), Kecamatan Batang Kuis (11,36 persen), Badan Keuangan dan Aset Daerah (11,14 persen), Kecamatan Galang (11,14 persen), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (10,11 persen).
3. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di kisaran $8 \leq 10$ persen terdapat pada Kecamatan

Kutalimbaru (9,40 persen), Kecamatan Pancur Batu (9,40 persen), Kecamatan Hamparan Perak (9,32 persen), RSUD Drs. H. Amri Tambunan (9,28 persen), Badan Pendapatan Daerah (9,27 persen), Dinas Pendidikan (9,20 persen), Kecamatan STM Hulu (9,00 persen), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (8,89 persen), Kecamatan Percut Sei Tuan (8,81 persen), Kecamatan Sunggal (8,78 persen), Kecamatan Gunung Meriah (8,64 persen), Dinas Perhubungan (8,58 persen), Kecamatan Bangun Purba (8,50 persen), Kecamatan Namorambe (8,42 persen), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (8,33 persen), Kecamatan STM Hilir (8,30 persen), dan Dinas Ketenagakerjaan (8,23 persen).

4. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di kisaran $5 \leq 8$ persen terdapat pada Kecamatan Pagar Merbau (7,94 persen), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (7,87 persen), Dinas Perikanan (7,74 persen), Kecamatan Biru-Biru (7,68 persen), Inspektorat (7,67 persen), Dinas Kesehatan (6,29 persen), Kecamatan Lubuk Pakam (5,67 persen), Dinas Ketahanan Pangan (5,13 persen), dan Dinas Sosial (5,07 persen).
5. Persentase rata-rata capaian anggaran perangkat daerah yang berada di bawah 5 persen terdapat pada Bappedalitbang (4,68 persen), Sekretariat Daerah (4,65 persen), Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (4,57 persen), Kecamatan Sibolangit (4,39 persen), Dinas Pertanian (4,35 persen), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (4,17 persen), Kecamatan Patumbak (3,94 persen), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (3,69 persen), Dinas Perpustakaan dan Arsip (3,35 persen), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (3,25 persen), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2,60 persen), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (2,32 persen), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (1,74 persen) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (0,94 persen).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari perangkat daerah masih dibawah 20 persen dikarenakan pada triwulan I sebagian besar

program/kegiatan/sub kegiatan belum terealisasi, perangkat daerah masih berfokus pada efisiensi anggaran dan penyesuaian terhadap visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

2.1.6 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 di Kabupaten Deli Serdang antara lain, sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menggunakan anggaran secara efisien, efektif dan produktif.
2. Dukungan peraturan perundang-undangan dan pendampingan dari pemerintah atasan (pusat dan provinsi) dalam rangka pencapaian kinerja.
3. Teknologi informasi yang memudahkan pelayanan dan memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
4. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja. Serta adanya komitmen dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai yang semakin berkualitas dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pokok masing masing.
6. Adanya rencana program yang rinci mencakup tujuan, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan, serta tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pelayanan.
7. Pengelolaan keuangan yang baik, dengan jadwal kegiatan dan rencana penarikan keuangan sesuai dengan situasi kondisi di lapangan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
8. Kondisi eksternal yang mendukung, seperti: partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan pembangunan.

2.1.7 Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I di Kabupaten Deli Serdang antara lain:

1. Dinamika regulasi dan tuntutan kompetensi yang begitu cepat yang belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Keterbatasan anggaran serta capaian realiasi pendapatan yang belum sesuai dengan perencanaan sehingga mengganggu aliran kas untuk realisasi belanja daerah dalam mendukung capaian kinerja;
3. Masih adanya beberapa aplikasi yang belum terintegrasi sehingga pengelola melakukan penginputan yang berulang/berkali-kali untuk tujuan yang seharusnya dapat teratasi melalui aplikasi yang terintegrasi, seperti: belum terintegrasinya aplikasi perencanaan (SIPD) dengan pelaporan kinerja (PAKDe) dan e-SAKIP;
4. Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang mengalami keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan dan pelaporan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
5. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan lainnya yang juga mengalami keterlambatan;
6. Adanya fluktuasi harga yang tidak terduga selama periode pelaksanaan, sehingga ada beberapa belanja yang terkendala dikarenakan perlu penyesuaian harga;
7. Kurangnya komunikasi yang efektif dengan pihak yang terlibat dalam program sehingga menyebabkan koordinasi yang kurang baik.

2.1.8 Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil dan kesimpulan evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2025 Triwulan I, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan RKPD tahun berjalan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi/IT, internet, untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan *upgrade* pengetahuan guna pencapaian kinerja serta mengupayakan integrasi antar aplikasi untuk memudahkan pengelolaan data base dan menghindari duplikasi dan kesalahan dalam penginputan data.

2. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan serta percepatan realisasi pendapatan daerah sehingga tidak mengganggu arus kas yang telah direncanakan;
3. Rasionalisasi belanja agar efisien, efektif dan produktif;
4. Pengintegrasian aplikasi yang ada sehingga dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana untuk pencapaian kinerja. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya. Serta remunerasi berbasis kinerja.
6. Akselerasi/percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk mengantisipasi permasalahan dalam lelang/pengadaan barang dan jasa.
7. Peningkatan komitmen dan kerjasama yang baik antar perangkat daerah.
8. Melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pada perangkat daerah;
9. Peningkatan komunikasi yang efektif dengan pihak yang terlibat dalam program sehingga koordinasi menjadi lebih baik dan efektif;
10. Pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu yang merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab. Deli Serdang hasil Reses Tahap I terhadap permasalahan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut.

1. Diharapkan terus menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain sehingga capaian PAD meningkat. Pertumbuhan PAD diharapkan dapat meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian. Upaya peningkatan pendapatan daerah, misalnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi serta sistem yang mencegah terjadinya kebocoran.

2. Infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui infrastruktur yang baik, terutama pemeliharaan dan pembangunan jalan serta sarana dan prasarananya akan membuka akses antar daerah, akses pariwisata, akses pertanian, akses perniagaan akan menggerakkan perekonomian masyarakat.
3. Diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum serta pada sektor UMKM dan UKM. Masyarakat juga mengharapkan adanya pelatihan/kursus-kursus padat karya bagi warga yang putus sekolah dan tamat sekolah namun belum memiliki pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Serta pengadaan sarana dan prasarana olahraga guna mengurangi peluang terjerumusnya penggunaan narkoba di kalangan remaja.
4. Melakukan pembenahan dalam pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu) melalui peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasnya.
5. Diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
6. Pengalokasian anggaran diharapkan tepat sasaran, khususnya kepada kepentingan masyarakat Deli Serdang.
7. Reformasi birokrasi dan kedisiplinan PNS beserta petugas dan aparatur lainnya dimasing-masing instansi harus terus ditingkatkan, agar pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal.
8. Perlunya penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu, seperti bantuan bibit pertanian, peternakan dan perikanan.
9. Diharapkan adanya terobosan baru dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, seperti melalui siskamling, pamswakarsa dan instrumen lain sehingga masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya dapat merasa aman.
10. Program-program perlindungan sosial harus terus diperluas jangkauannya khususnya kepada masyarakat miskin, serta perhatian terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat, khususnya terhadap masyarakat kurang mampu.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pada P-RKPD Tahun 2025 mengacu pada permasalahan pada RKPD 2025 dan Ranwal RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029. Adapun permasalahan pada P-RKPD Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Peran pemerintah penting dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Mengingat hal tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terhadap tata kelola pemerintahan, di antaranya terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 adalah 76,36 (kategori BB). Meskipun mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 58,52 dengan kategori CC, namun mengingat tingginya tuntutan masyarakat akan layanan serta untuk memberikan landasan yang kuat bagi fondasi transformasi maka dibutuhkan tata kelola yang berkualitas. Serta tuntutan akan perlunya pelayanan yang cepat, transparan, mudah dan berbasis elektronik/ digital serta peningkatan peran kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan.

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mencapai target yaitu dengan realisasi 77,56 persen dari target sebesar 76,82 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, IPM tersebut belum termasuk pada kriteria sangat tinggi (≥ 80 persen), dan komponen pembentuk IPM pada pengeluaran perkapita trennya masih relatif datar, serta pada tahun 2024 Harapan Lama Sekolah (13,40 persen) di bawah Propinsi (13,49 persen).
- b. Daya saing SDM yang masih rendah yang terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih di bawah target yaitu dengan realisasi 8,02 persen dari target sebesar 6,90 persen pada tahun 2024. Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2024 sebagian besar didominasi oleh pendidikan menengah kebawah, yaitu: mayoritas berpendidikan SMA (36,23 persen), SMK (17,91 persen), SMP (16,16 persen), sementara menengah keatas hanya sekitar 12,29

- persen yaitu : Diploma (2,90 persen) dan Universitas (9,39 persen).
- c. Stunting juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditanggulangi untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan daya saing. Prevalensi stunting di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 s/d 2022 termasuk rendah (berada dibawah Provinsi dan Pusat). Namun, pada tahun 2023 prevalensi stunting di Kabupaten Deli Serdang meningkat menjadi sebesar 33,80 persen dibandingkan tahun 2022 (13,9 persen).
3. Ketahanan ekonomi yang masih belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi, investasi dan inflasi.
 - a. Ekonomi yang berkualitas dan inklusi belum optimal, meskipun Laju Pertumbuhan Ekonomi telah mencapai 5,36 persen dari target sebesar 5,20 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan secara persentase sudah rendah (3,44 persen), namun jika persentase tersebut dikonversi jumlahnya sekitar 67.217 orang.
 - b. Nilai investasi PMDN masih di bawah target yaitu dengan realisasi 4.662.951,54 (dalam juta rupiah) dari target sebesar 2.772.893,58 (dalam juta rupiah) pada tahun 2024.
 - c. Penanganan UMKM yang belum optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Serta stabilitas inflasi yang perlu dijaga.
 - d. Tuntutan akan kemudahan perizinan dan berusaha serta fasilitasi terhadap wira usaha baru untuk tumbuh dan berkembang serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
 4. Capaian kinerja infrastruktur yang yang masih perlu dijaga dan ditingkatkan, diantaranya, pada tahun 2024: jalan dalam kondisi baik sebesar 76,34 persen yang masih membutuhkan pemeliharaan guna memastikan terjaga kualitasnya, irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dalam kondisi baik masih 80,04 persen, areal kawasan kumuh 0,13 persen, rumah tangga yang mendapat akses air minum 78,2 persen, rumah tinggal yang bersanitasi 78,00 persen. Perlu dukungan dari pemerintah atasan untuk meningkatkan infrastruktur, khususnya di kawasan daerah perbatasan Kabupaten

Deli Serdang. Serta tuntutan akan lingkungan aman dan ideal bagi masyarakat untuk hidup secara layak.

5. Degradasi kualitas lingkungan hidup

Lingkungan hidup penting dalam memberikan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang menurun dari 63,00 poin pada tahun 2020 menjadi 57,37 poin pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 63,45 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih lambatnya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang. Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2024 timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah masih sebesar 61,38 persen, di mana masih terdapat 38,62 persen sampah yang belum terolah di fasilitas pengolahan sampah. Serta perlunya peningkatan kapasitas mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Ketersediaan infrastruktur dalam pemenuhan akses untuk pelayanan dasar, pengembangan ekonomi dan konektivitas antar wilayah yang masih belum optimal.

2.2.3. Perumusan Isu Strategis Daerah pada Perubahan RKPD 2025

1. Tuntutan akan pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah serta birokrasi yang profesional, berintegrasi dan berkinerja tinggi.
2. Meningkatnya pengangguran sebagai dampak persaingan tingkat global, nasional dan regional, serta tuntutan akan kualitas dan daya saing SDM yang semakin kompetitif;
3. Ketahanan ekonomi melalui produk unggulan daerah dan pemberdayaan pelaku UKM dan UMKM;
4. Kualitas Infrastruktur, khususnya untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan guna memastikan dan menjaga kualitasnya.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit/puskesmas rawat inap, Meningkatkan kapasitas rumah sakit, pengadaan alat medis, dan penyediaan tenaga kesehatan.
6. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Meningkatkan infrastruktur sekolah, pengadaan buku, dan pelatihan guru.

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2025.

Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa prioritas dan fokus pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2025-2029), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. 12 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah pada P-RKPD Tahun 2025

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 kategori B. Masih adanya perangkat daerah yang belum mengukur dan melaksanakan suvei kepuasan masyarakat, perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung	Tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan akan pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah serta birokrasi yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi	Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik Yang Sehat Dan Berkualitas, untuk mendukung Sehat Pelayanannya

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
	perwujudan reformasi birokrasi;		
2	Kualitas dan daya saing SDM yang masih perlu ditingkatkan, diantaranya terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang sebesar 8,02 masih lebih tinggi dari Provinsi (5,60) dan Pusat (4,91).	Kualitas dan Daya Saing SDM. Meningkatnya pengangguran sebagai dampak persaingan tingkat global, nasional dan regional, serta tuntutan akan kualitas dan daya saing SDM yang semakin kompetitif. Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Berbudaya, untuk mendukung Sehat Masyarakatnya
3.	Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu ditingkatkan, diantaranya capaian investasi PMA masih 59,63persen, persentase realisasi PDB (ADHB) pada 2023 masih 80,17 persen, persentase koperasi aktif masih 29,49 persen, persentase usaha mikro naik kelas masih 38,71 persen.	Daya saing ekonomi melalui Produk unggulan. Ketahanan ekonomi melalui produk unggulan daerah dan pemberdayaan pelaku UKM dan UMKM	Pembangunan Ekonomi Yang Sehat, Berkualitas Dan Inklusif, untuk mendukung Sehat Ekonominya
4.	Capaian kinerja infrastruktur yang masih perlu dijaga dan ditingkatkan, diantaranya jalan dalam kondisi baik sebesar 76,34 persen yang masih membutuhkan pemeliharaan guna memastikan terjaga . kualitasnya, irigasi dalam kondisi baik masih 80,04 persen, areal kawasan kumuh masih 0,13 persen,	Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berkelanjutan. Kualitas Infrastuktur, khususnya untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jalan guna memastikan dan menjaga kualitasnya.	Pembangunan Lingkungan Yang Sehat, Aman, Nyaman Dan Berkelanjutan, untuk mendukung Sehat Lingkungannya

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
	<p>rumah tangga yang mendapat akses air minum masih 78,2 persen, rumah tinggal yang bersanitasi masih 78. Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang menurun dari 63,00 poin pada tahun 2020 menjadi 57,37 poin pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 63,45 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih lambatnya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah masih sebesar 61,38 persen, di mana masih terdapat 38,62 persen sampah yang belum terolah di fasilitas pengolahan sampah. Serta tuntutan akan lingkungan aman dan ideal bagi masyarakat untuk hidup secara layak.</p>		

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian di tingkat daerah. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang efektif, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi yang berkembang baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Pada dasarnya, kerangka ekonomi daerah berfokus pada pengkajian indikator-indikator makroekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Indikator ini menjadi alat ukur yang penting untuk menilai kinerja ekonomi daerah dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang ada dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025, masalah-masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius dan berkelanjutan. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh kondisi capaian indikator makro ekonomi Nasional dan Propinsi Sumatera Utara.

Pada bagian kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dibahas kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Deli Serdang baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian global, nasional maupun perekonomian regional. Sementara itu, analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk

pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait kerangka ekonomi tahun 2025 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja yang sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden.

Pada tahun 2025, perekonomian Kabupaten Deli Serdang diproyeksi terus menunjukkan peningkatan, seiring dengan perekonomian Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya menyusun strategi guna memanfaatkan momentum tersebut, melalui penguatan perekonomian lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesempatan kerja guna Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Beberapa lembaga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 akan berada di kisaran 3,2 persen (Bank Indonesia) hingga 2,7 persen (Bank Dunia). Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2 persen, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1 persen. Risiko yang memengaruhi kondisi global meliputi pelemahan ekonomi China dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut, dampak perubahan iklim, serta ketidakpastian suku bunga global. Sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,7 persen pada 2025 dan stagnan pada 2026.

OECD memproyeksikan pertumbuhan PDB global akan berada pada angka 3,3 persen pada tahun 2025, naik dibanding tahun 2024 pada 3,2 persen. Prediksi yang positif juga diberikan pada inflasi, yang diperkirakan akan mereda menjadi 3,8 persen pada tahun 2025. Sebagai perbandingan, inflasi pada tahun 2024 adalah 5,4 persen. Penurunan tingkat inflasi global ini didukung oleh kebijakan moneter yang masih ketat di sebagian besar

negara. Proyeksi itu lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 3,3 persen untuk 2025 dan 2026. Permasalahan terkait pasar tenaga kerja juga berangsur mereda, dengan tingkat pengangguran tetap rendah menurut standar historis. Volume perdagangan global juga akan mulai pulih. Menurut prediksi, ada peningkatan sebesar 3,6 persen volume perdagangan global tahun 2025 dibanding tahun 2024. Namun, dalam rilis terupdatenya OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan terus menurun dari tahun ke tahun, diperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat dari 3,2 persen pada 2024 menjadi 3,1 persen pada 2025 dan 3,0 persen pada 2026. Dikarenakan hambatan perdagangan yang lebih tinggi di beberapa ekonomi G20, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, dan kebijakan yang membebani investasi serta pengeluaran rumah tangga. OECD juga memproyeksi bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global serta meningkatkan inflasi.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional

Mengingat Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global/terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global dan pertumbuhannya yang melambat.

Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik. Berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 berada di kisaran 5 persen hingga 5,1 persen. Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,1 persen.

IMF dalam laporan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2024 dan Bank Dunia dalam laporan *Indonesia Economic Prospects* edisi Desember

2024 sama-sama memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di angka 5,1 persen. Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen *year-on-year (YoY)* pada tahun 2025. Proyeksi tersebut didorong oleh angka permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas serta memperkuat ekonomi. Selain kedua faktor tersebut, sejumlah faktor lain yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Faktor-faktor tersebut adalah sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga—khususnya kelas menengah ke atas, investasi ke berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan kinerja ekspor nonmigas yang diperkirakan akan meningkat. Serta mobilitas masyarakat di hari libur nasional sepanjang tahun 2025 juga diharapkan dapat menjadi salah satu kontributor aktivitas ekonomi, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dapat terwujud.

Sementara *OECD* dan *PBB (melalui United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD))* mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,2 persen. Namun, rilis terupdate *OECD* menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,9 persen, salah satunya dampak dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara akan semakin kuat dan berada dalam kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada tahun 2025. Sedangkan inflasi, BI memperkirakan prospek inflasi di Sumatera Utara akan tetap rendah dan stabil dalam kisaran target 2,5 persen +/- 1 persen pada tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara menunjukkan inflasi *year-on-year (y-on-y)* sebagai berikut: Januari 2025: sebesar 1,78 persen, Februari 2025: sebesar 0,73 persen dan Maret 2025: sebesar 0,69 persen.

BI memperkirakan sektor pertanian dan perdagangan akan tetap menjadi andalan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2025. Namun, terdapat tantangan berupa melemahnya kinerja ekspor komoditas unggulan Sumut. Pada awal tahun 2025, ekspor dalam satuan berat (ton) tercatat mengalami penurunan. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 juga berpotensi menahan kinerja konsumsi rumah tangga. Para pelaku usaha juga cenderung *wait and see* dalam melakukan investasi selama periode transisi pemerintahan.

Nilai ekspor Sumatera Utara melalui pelabuhan muat mengalami kenaikan sebesar 9,03 persen pada Februari 2025 dibandingkan Januari 2025, dan meningkat signifikan sebesar 34,23 persen dibandingkan Februari 2024. Di bidang pariwisata, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Utara pada Februari 2025 tercatat rata-rata 31,07 persen, mengalami penurunan dibandingkan Februari 2024. Nilai Tukar Petani (NTP): NTP Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2025 tercatat sebesar 145,81, mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2025. Beberapa faktor yang mendukung hal, diantaranya : a).Implementasi program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan berlanjutnya program bantuan sosial diprediksi akan mendorong konsumsi masyarakat; b).Hari Besar Keagamaan, yakni peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri (Nataru) pada awal tahun 2025 juga berkontribusi pada konsumsi; c). Gaji ke-13 ASN, yakni pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan menjaga daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2025 diproyeksikan akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dengan inflasi yang terjaga. Sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penopang utama. Namun, tantangan terkait kinerja ekspor dan kebijakan fiskal perlu diwaspadai. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mendorong digitalisasi untuk memperkuat perekonomian. Namun, perlu diingat bahwa proyeksi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, baik di tingkat regional, nasional, maupun global.

3.1.4 Kondisi Ekonomi Deli Serdang

Kondisi ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 diproyeksi tumbuh positif. Hal ini, berdasarkan data historis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,34 persen dan kembali meningkat menjadi 5,36 pada tahun 2024. Meskipun proyeksi spesifik untuk tahun 2025 belum dirilis secara resmi, pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB Kabupaten Deli Serdang juga terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2024, ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) mencapai Rp 83,868 triliun dan ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) sebesar Rp 151,451 triliun pada tahun 2024.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang berkontribusi signifikan, merupakan daerah dengan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan, dengan kontribusi sebesar 13,30 persen) akan berada dalam kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada tahun 2025. Dengan kontribusi Deli Serdang yang besar, diperkirakan pertumbuhan ekonominya akan berada dalam kisaran yang tidak jauh berbeda. Beberapa sektor potensial Kabupaten Deli Serdang, diantaranya :

- Sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa menjadi penopang utama ekonomi Kabupaten Deli Serdang.
- Sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
- Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan perluasan Bandara Kuala Namu sebagai kawasan aeropolitan diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* yang positif bagi perekonomian daerah.

Selanjutnya, pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang terus mengalami peningkatan dan bahkan melampaui rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024. Prospek peningkatan pendapatan per kapita di tahun-tahun berikutnya juga dinilai baik.

Serta inflasi yang terkendali. Data inflasi *year-on-year* (y-on-y) Kabupaten Deli Serdang menunjukkan angka yang relatif stabil di awal tahun 2025: Januari 2025: 1,67 persen, Februari 2025: 1,01 persen dan Maret 2025: 1,24 persen. Meskipun demikian, pemerintah daerah perlu terus memantau dan menjaga stabilitas harga.

Beberapa tantangan dan Fokus Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, diantaranya:

- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyadari pentingnya penggunaan anggaran yang efisien, efektif, dan produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Fokus juga diberikan pada munculnya kawasan-kawasan pertumbuhan baru, dukungan terhadap swasembada pangan, peningkatan kualitas dan nilai komoditas unggulan, serta pembangunan dan pengembangan kawasan afirmasi untuk pemerataan pembangunan.
- Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kerjasama pentahelix (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media) sebagai pilar utama pembangunan.

Beberapa faktor yang diperkirakan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi berdasarkan konsumsi di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 adalah:

- Pendapatan Per Kapita yang Meningkat: Tren peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Deli Serdang diharapkan akan terus mendorong pengeluaran konsumsi.
- Aktivitas Ekonomi yang Meningkat: Pertumbuhan di berbagai lapangan usaha akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi.
- Hari Besar Keagamaan dan Musiman: Perayaan hari besar seperti Idul Fitri di awal tahun 2025 biasanya mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.
- Potensi Hambatan: Kenaikan tarif listrik yang menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Deli

Serdang, pada awal tahun 2025 dapat sedikit menahan laju pertumbuhan konsumsi.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2025 diprediksi akan tetap stabil dengan potensi pertumbuhan yang baik. Peningkatan pendapatan per kapita dan kontribusi dari berbagai sektor utama memberikan prospek positif bagi perekonomian daerah. Didukung oleh sektor-sektor yang kuat dan fokus pemerintah daerah pada pembangunan yang efektif dan merata, Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Sumatera Utara. Dari sisi konsumsi, peningkatan pendapatan per kapita dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi akan menjadi pendorong utama, meskipun perlu diperhatikan potensi dampak dari kenaikan harga komoditas tertentu. Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap inflasi dan tantangan ekonomi lainnya tetap diperlukan.

3.1.5 Kondisi Dan Prospek Penanaman Modal/ Investasi di Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kondisi dan prospek yang sangat menjanjikan untuk penanaman modal/ investasi, yang akan memperkuat dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan keuangan daerah.

a. Kondisi Investasi Saat Ini:

- **Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil:** Perekonomian Deli Serdang, selama lima tahun terakhir (2020 s/d 2024) menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2020, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku mencapai Rp110,15 triliun, dan terus menunjukkan peningkatannya setiap tahun menjadi Rp151,45 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 mencapai 5,36 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara (5,03 persen) dan Nasional (5,03 persen).
- **Kontribusi Ekonomi yang Signifikan:** Deli Serdang memberikan kontribusi sebesar 13,30 persen terhadap perekonomian Sumatera

Utara, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar setelah Kota Medan.

- **Realisasi Investasi yang Positif:** Realisasi investasi di Triwulan I tahun 2024 mencapai Rp4,24 triliun lebih, atau 97,25 persen dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan iklim investasi yang kondusif.
- **Penciptaan Lapangan Kerja:** Investasi yang masuk telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2.400 orang. Peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) dari 19.990 pada tahun 2023 menjadi 32.596 pada semester I tahun 2024 (naik 163 persen) menunjukkan geliat usaha baru dan peningkatan aktivitas ekonomi.
- **Pendapatan Per Kapita yang Tinggi:** Selama 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren peningkatan. Pendapatan per kapita masyarakat Deli Serdang pada tahun 2020 sebesar Rp57,03 juta, terus meningkat dari tahun ketahun, mencapai Rp73,93 juta pada tahun 2024, melampaui rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Utara (Rp73,57 juta).
- **Infrastruktur Pendukung:** Keberadaan kawasan industri, seperti Kawasan Industri Medan II (KIM II), Kawasan Industri Medan Star, Kawasan Industri Deli Serdang (KIDS), dan Kawasan Industri Hampanan Perak menjadi daya tarik utama bagi investor. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur, terutama jalan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Deli Serdang. Infrastruktur, khususnya jalan, sejalan dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu: Program Jumpa Dia (jalan utama pasti mantap di deli serdang) untuk memastikan kondisi ruas jalan utama di Kabupaten Deli Serdang senantiasa dalam kondisi baik sepanjang tahun serta diharapkan menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modalnya ke Deli Serdang.

b. Prospek Penanaman Modal Investasi:

- **Komitmen Pemerintah Daerah:** Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat berkomitmen untuk mempermudah segala bentuk perizinan guna menarik investor dan menciptakan lapangan kerja. Ini termasuk program-program seperti wirausaha baru dan pendampingan, pendampingan luar negeri, kemudahan kerja, peningkatan keahlian buruh, partisipasi, dan kemudahan kreasi.

- **Sektor Unggulan yang Potensial:**
 - ✓ **Pertanian dan Perkebunan:** Deli Serdang memiliki potensi besar di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan (padi, ubi kayu, jagung, bawang merah, cabai merah, kacang panjang), perkebunan (karet, kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa), dan peternakan (ayam ras pedaging, domba).
 - ✓ **Perikanan:** Potensi perikanan laut juga signifikan, terutama di Kecamatan Pantai Labu, Percut Sei Tuan, dan Hamparan Perak.
 - ✓ **Industri:** Dengan adanya beberapa kawasan industri, sektor industri tetap menjadi daya tarik investasi yang kuat.
 - ✓ **Pariwisata:** Potensi pariwisata seperti Air Terjun Sampuran Putih dan Arung Jeram Sungai Buaya dapat dikembangkan lebih lanjut.
 - ✓ **UMKM:** Sektor UMKM juga menjadi salah satu potensi yang terus didorong perkembangannya.
- **Iklm Investasi yang Kondusif:** Upaya menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk pemberantasan premanisme, menjadi prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha.
- **Dukungan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi:** Program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan, serta mendorong produktivitas nasional sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045.
- **Sektor Properti:** Meskipun ada tantangan seperti pemberlakuan PPN 12 persen pada tahun 2025, pasar properti di Medan dan sekitarnya (termasuk Deli Serdang) diprediksi akan tetap bergairah. Inovasi seperti integrasi teknologi dan hunian ramah lingkungan dapat menjadi daya tarik.

c. Dampak Terhadap Keadaan Ekonomi dan Keuangan Daerah:

Penanaman modal investasi yang terus meningkat di Deli Serdang akan memberikan dampak positif yang signifikan:

- **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi:** Investasi secara langsung berkontribusi pada peningkatan PDRB, mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

- **Penciptaan Lapangan Kerja:** Pembukaan usaha baru dan ekspansi industri akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Peningkatan aktivitas ekonomi dan jumlah perusahaan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah (Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel dan Restoran, dll.) serta retribusi daerah, sehingga memperkuat keuangan daerah.
- **Peningkatan Pendapatan Per Kapita:** Seiring dengan peningkatan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat akan terus meningkat, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan.
- **Pengembangan Infrastruktur:** Investasi seringkali diikuti dengan pembangunan atau peningkatan infrastruktur pendukung, baik oleh investor maupun pemerintah daerah untuk menarik investasi lebih lanjut.
- **Transfer Teknologi dan Pengetahuan:** Investasi, terutama dari Penanaman Modal Asing (PMA), dapat membawa teknologi dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri lokal.
- **Diversifikasi Ekonomi:** Dengan masuknya investasi ke berbagai sektor, Deli Serdang dapat mengurangi ketergantungan pada satu atau dua sektor saja, membuat perekonomian lebih resilient terhadap gejolak ekonomi.
- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Peningkatan investasi seringkali diiringi dengan kebutuhan akan tenaga kerja terampil, yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di daerah tersebut.

Selain itu, daya tarik investor terhadap suatu daerah dapat terlihat dari capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dihitung melalui lingkungan pendukung (terdiri dari 4 pilar yaitu: institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro), Sumber Daya Manusia (terdiri dari 2 pilar yaitu: kesehatan dan ketrampilan), Pasar (terdiri dari 2 pilar yaitu: pasar produk, pasar tenaga kerja, system keuangan dan ukuran pasar) dan Ekosistem Inovasi (terdiri dari 2 pilar yaitu: dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Semakin tinggi IDSD suatu daerah maka semakin

daya Tarik investor terhadap daerah tersebut. Capaian IDSD Kab Deli Serdang Tahun 2024 (3,74) lebih besar dari Provinsi (3,71) dan Nasional (3,43). Dan merupakan kabupaten tertinggi capaian IDSDnya di Sumatera Utara. Capaian IDSD tersebut, diharapkan menjadi daya Tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diungkapkan bahwa Kabupaten Deli Serdang memiliki fundamental ekonomi yang kuat, komitmen dan dukungan pemerintah daerah yang pro-investasi, dan potensi sektor unggulan yang beragam, menjadikan Deli Serdang sebagai wilayah yang sangat prospektif untuk penanaman modal investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi ekonomi dan keuangan daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan kebijakan daerah.

Kebijakan keuangan daerah menjadi pilar utama dalam mendukung efektivitas perencanaan pembangunan, terutama dalam konteks pengelolaan fiskal yang sehat, efisien, dan transparan. Dalam rencana pembangunan daerah, pembahasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah dirancang.

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, kebijakan keuangan yang baik akan memastikan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi dalam pengalokasian anggaran, serta kesinambungan antara belanja dan investasi publik. Dengan demikian, keuangan daerah yang sehat akan memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka

Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan

daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah merupakan faktor krusial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam memastikan ketersediaan dana bagi program prioritas pemerintah. Dalam konteks perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber-sumber pendapatan, serta mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sektor.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Kebijakan utama pendapatan daerah diarahkan untuk menuju pada kemandirian keuangan daerah dari total pendapatan daerah. Strategi yang ditempuh antara lain, meliputi : 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Penajaman dan penguatan kinerja Perumda yang berdampak pada peningkatan bagi hasil laba Perumda; 3. Penajaman dan perluasan dalam kerjasama pemanfaatan aset daerah; 4. Optimalisasi kinerja BLUD menuju kemandirian BLUD.

Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.335.349.826.581,-. Dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 menjadi Rp4.330.097.392.111,-. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,80 persen.

Selanjutnya, terlihat bahwa pada tahun 2024 sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer sebesar 72,99 persen, yang terdiri dari dana transfer sebagian besar berasal dari DAU sebesar 41,28 persen, selanjutnya dari DAK sebesar 11,97 persen, DID sebesar 4,65 persen dan DBH Pajak/ Bukan Pajak sebesar 1,72 persen. Sedangkan PAD sebesar 27,01 persen, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar 17,88 persen, selanjutnya dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 4,48 persen, selanjutnya Retribusi Daerah sebesar 1,43 persen dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,49 persen. Dari realisasi tersebut, terlihat bahwa hampir sebagian besar sekitar 72,99 persen pendapatan daerah berasal dari dana pemerintah atasan berupa dana transfer. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang optimal untuk menggali dan meningkatkan sumber PAD sehingga selisih proporsi PAD dan dana transfer tidak terlalu besar. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga kebutuhan akan pendanaan terhadap program pembangunan dapat terpenuhi. Gambaran realisasi pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Empat Tahun Terakhir (2020 s/d 2024)

No	URAIAN	Realisasi 2020	% Distribusi Komponen 2020	Realisasi 2021	% Distribusi Komponen 2021	Realisasi 2022	% Distribusi Komponen 2022	Realisasi 2023	% Distribusi Komponen 2023	Realisasi 2024	% Distribusi Komponen 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	3.335.349.826.581	100,00	3.539.280.627.629	100,00	3.731.018.449.348	100,00	3.853.330.105.887	100,00	4.330.097.392.111	100,00	6,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	809.719.829.265	24,28	926.137.759.153	26,17	1.041.732.670.188	27,92	1.049.802.528.387	27,24	1.169.363.269.637	27,01	9,76
4.1.01	Pajak Daerah	596.316.675.899	17,88	672.462.837.506	19,00	767.658.224.719	20,58	797.734.218.178	20,70	885.444.485.970	20,45	10,46
4.1.02	Retribusi Daerah	47.643.621.168	1,43	32.397.075.320	0,92	29.221.518.926	0,78	43.129.679.515	1,12	45.003.701.845	1,04	2,53
4.1.03	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.190.194.281	0,49	22.228.003.613	0,63	21.867.488.711	0,59	19.681.368.926	0,51	20.435.467.088	0,47	7,38
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	149.569.337.917	4,48	199.049.842.714	5,62	222.985.437.832	5,98	189.257.261.768	4,91	218.479.614.734	5,05	11,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.049.562.028.316	61,45	2.451.655.133.476	69,27	2.687.662.779.160	72,04	2.803.527.577.500	72,76	3.160.734.122.474	72,99	11,57
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.992.315.291.316	59,73	2.451.655.133.476	69,27	2.687.662.779.160	72,04	2.547.684.285.288	66,12	2.909.911.686.357	67,20	10,42
4.2.01	DBH Pajak/ Bukan Pajak	61.232.707.069	1,84	125.659.773.534	3,55	123.584.262.879	3,31	70.132.681.000	1,82	-	-	-
4.2.01	DAU	1.376.847.320.000	41,28	1.354.889.566.000	38,28	1.348.515.058.970	36,14	1.507.732.049.770	39,13	2.535.296.273.557	58,55	19,47
4.2.01	DAK	399.214.595.919	11,97	393.975.208.610	11,13	630.872.162.655	16,91	610.403.014.618	15,84	-	-	11,11
4.2.02	Dana Desa	-	-	312.024.280.840	8,82	323.862.404.000	8,68	347.737.140.900	9,02	352.469.480.800	8,14	-
4.2.02	DID/ Insentif Fiskal	155.020.668.328	4,65	265.106.304.492	7,49	260.828.890.656	6,99	11.679.399.000	0,30	22.145.932.000	0,51	15,87
	TRANSFER ANTAR DAERAH	57.246.737.000	1,72	-	-	-	-	255.843.292.212	6,64	250.822.436.117	5,79	-
4.2.03	DBH Provinsi	57.246.737.000	1,72	-	-	-	-	255.843.292.212	6,64	250.822.436.117	5,79	-
	BKP Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, LRA Audited 2020 s/d 2024

Dalam RKPD Tahun 2025, pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang diproyeksikan sebesar Rp5.048.980.671.203,- yang terdiri dari PAD sebesar Rp1.742.871.900.227,- dan pendapatan transfer sebesar Rp3.306.108.770.976,. Selanjutnya, dalam APBD Tahun 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4.804.372.365.278,- dengan PAD sebesar Rp1.590.489.582.469, pendapatan transfer sebesar Rp 3.213.882.782.809,-. Sampai dengan Triwulan I tahun 2025, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp 966.388.746.182,- atau terealisasi sebesar 20,11 persen. Realisasi terbesar adalah pada komponen Pendapatan Transfer terealisasi Rp795.246.618.837,- atau terealisasi sebesar 16,55 persen dengan bobot sebesar 82,29 persen dari pendapatan daerah. Selanjutnya pada komponen Pendapatan Asli Daerah terealisasi Rp171.142.127.345,- atau terelisasi sebesar 3,56 persen dengan bobot 17,71 persen dari pendapatan daerah. Selanjutnya, pada P-RKPD 2025, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4.781.215.361.434 yang terdiri dari PAD sebesar Rp1.599.788.162.625,- dan pendapatan transfer sebesar Rp3.181.427.198.809,-.

Tabel 3.2 Struktur Pendapatan pada RKPD 2025, APBD 2025, Realisasi Triwulan I 2025 dan Proyeksi pada P-RKPD 2025

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Realisasi Triwulan I 2025	Persen Distribusi Komponen realisasi tw I	Persen Realisasi (Tw I terhadap RKPD)	Persen Realisasi (Tw I terhadap APBD)	Proyeksi P-RKPD 2025	SELISIH	
									(Proyeksi P-RKPD 2025 dengan Realisasi Tw I)	(Proyeksi P-RKPD 2025 dengan APBD 2025)
4	PENDAPATAN DAERAH	5.048.980.671.203	4.804.372.365.278	966.388.746.182	100,00	19,14	20,11	4.781.215.361.434	3.814.826.615.252	- 23.157.003.844
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.742.871.900.227	1.590.489.582.469	171.142.127.345	17,71	9,82	10,76	1.599.788.162.625	1.428.646.035.280	9.298.580.156
4.1.01	Pajak Daerah	1.414.647.479.893	1.264.273.303.335	155.620.604.220	16,10	11,00	12,31	1.264.273.303.335	1.108.652.699.115	-
4.1.02	Retribusi Daerah	96.935.366.704	94.927.225.504	12.309.766.601	1,27	12,70	12,97	94.927.225.504	82.617.458.903	-
4.1.03	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.435.467.088	20.435.467.088		-	-	-	20.435.467.088	20.435.467.088	-
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	210.853.586.542	210.853.586.542	3.211.756.524	0,33	1,52	1,52	220.152.166.698	216.940.410.174	9.298.580.156
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.306.108.770.976	3.213.882.782.809	795.246.618.837	82,29	24,05	24,74	3.181.427.198.809	2.386.180.579.972	- 32.455.584.000
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.981.847.435.087	3.009.287.483.000	752.005.379.082	77,82	66,89	66,40	2.991.996.285.000	2.239.990.905.918	- 17.291.198.000
4.2.01	DBH Pajak/ Bukan Pajak	80.638.707.000	85.948.439.000	1.370.456.700	0,14	1,70	1,59	86.003.438.000	84.632.981.300	54.999.000
4.2.01	DAU	1.825.350.964.087	1.870.081.114.000	552.455.620.000	57,17	30,27	29,54	1.858.932.206.000	1.306.476.586.000	- 11.148.908.000
4.2.01	DAK	709.803.256.000	665.802.738.000	151.454.867.840	15,67	21,34	22,75	659.605.449.000	508.150.581.160	- 6.197.289.000
4.2.02	Dana Desa	343.908.576.000	373.382.667.000	46.724.434.542	4,83	13,59	12,51	373.382.667.000	326.658.232.458	-
4.2.02	DID/ Insentif Fiskal	22.145.932.000	14.072.525.000		-	-	-	14.072.525.000	14.072.525.000	-
	TRANSFER ANTAR DAERAH	324.261.335.889	204.595.299.809	43.241.239.755	4,47	13,34	21,14	189.430.913.809	146.189.674.054	- 15.164.386.000
4.2.03	DBH Provinsi	324.261.335.889	181.528.963.809	43.241.239.755	4,47	13,34	23,82	181.528.963.809	138.287.724.054	-
	BKP Provinsi		23.066.336.000		-			7.901.950.000		- 15.164.386.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH									
4.3.01	Hibah									
4.3.03	Lain PD perundang-undangan									

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, LRA un Audited Triwulan I 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa selisih pendapatan daerah pada P-RKPD 2025 terhadap APBD 2025 sebesar Rp-23.157.003.844,- yang merupakan penyesuaian belanja transfer baik dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah dan penyesuaian lain-lain pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah serta mengoptimalkan koordinasi lintas perangkat daerah dalam peningkatan pendapatan;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Melakukan penilaian ulang terhadap besaran nilai pajak bumi dan bangunan, khususnya daerah yang berbatasan dengan kota medan dan cepat tumbuh;
3. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan dan belanjanya secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara professional sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
7. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; dan
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditempuh melalui:
 - a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, regulasi penyesuaian tarif pungutan, menyederhanakan sistem prosedur pelayanan, digitalisasi layanan;
 - b. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, serta penilaian ulang terhadap besaran nilai pajak bumi dan bangunan, khususnya daerah yang berbatasan dengan kota medan dan cepat tumbuh ;
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan;
 - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik;
 - f. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Optimalisasi opsen pajak;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana perimbangan daerah;
3. Strategi pencapaian lain-lain pendapatan yang sah yang optimal ditempuh melalui:

- a. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya;
- b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
- c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat yang profesional.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dalam rangka pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, saat ini pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Belanja daerah selama 5 (lima) tahun berfluktuasi. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 3.274.161.220.722,-. Dan terus menunjukkan tren peningkatan hingga pada 2024 sebesar Rp 4.265.025.228.239,-. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,87 persen. Selanjutnya, terlihat bahwa pada tahun 2024 sebagian besar belanja daerah dialokasikan pada belanja operasional Rp2.981.070.639.968,- atau sebesar 69,90 persen, yang sebagian besar pada belanja pegawai Rp 1.390.219.781.592 atau sebesar 32,60 persen dan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.299.937.306.713 atau sebesar 30,48 persen. Masih besarnya belanja operasional tersebut dikarenakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk membayar gaji dan operasional pegawai guna memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Persentase belanja pegawai tersebut masih diatas 30 persen dan akan terus diupayakan untuk merasionalkan belanja pegawai hingga dibawah 30 persen. Sedangkan belanja modal sebesar Rp 666.604.042.967,- atau sebesar 15,63 persen, belanja transfer Rp 615.095.232.970,- atau sebesar 14,42 persen dan belanja tidak terduga Rp 2.255.312.334,- atau sebesar 0,05 persen. Belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir (2020 s/d 2024)

No	URAIAN	Realisasi 2020	% Distribusi Komponen 2020	Realisasi 2021	% Distribusi Komponen 2021	Realisasi 2022	% Distribusi Komponen 2022	Realisasi 2023	% Distribusi Komponen 2023	Realisasi 2024	% Distribusi Komponen 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
5	BELANJA DAERAH	3.274.161.220.722	100,00	3.473.760.778.916	100,00	3.748.625.178.211	100,00	3.864.372.930.376	100,00	4.265.025.228.239	100,00	6,87
5.1	BELANJA OPERASI	2.223.407.524.744	67,91	2.424.674.840.910	69,80	2.641.356.377.407	70,46	2.761.112.083.034	71,45	2.981.070.639.968	69,90	7,62
5.1.01	Belanja Pegawai	1.351.706.896.984	41,28	1.315.013.905.179	37,86	1.317.944.293.617	35,16	1.301.585.415.181	33,68	1.390.219.781.592	32,60	0,77
5.1.02	Belanja barang dan jasa	842.395.196.760	25,73	1.068.303.505.091	30,75	1.166.181.224.429	31,11	1.230.270.265.839	31,84	1.299.937.306.713	30,48	11,78
5.1.03	Belanja bunga		-		-		-				-	
5.1.04	Belanja subsidi		-		-		-				-	
5.1.05	Belanja hibah	29.305.431.000	0,90	40.423.554.040	1,16	157.230.859.361	4,19	229.142.142.014	5,93	290.833.301.664	6,82	99,89
5.1.06	Belanja bantuan sosial		-	933.876.600	0,03		-	114.260.000	0,00	80.250.000	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	480.305.325.652	14,67	520.913.969.424	15,00	563.480.586.116	15,03	518.703.185.644	13,42	666.604.042.967	15,63	9,30
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	66.697.144.313	2,04	11.330.338.835	0,33	6.727.247.505	0,18	2.205.249.833	0,06	2.255.312.334	0,05	
5.4	BELANJA TRANSFER	503.751.226.013	15,39	516.841.629.747	14,88	537.060.967.183	14,33	582.352.411.865	15,07	615.095.232.970	14,42	5,14
5.4.01	Belanja bagi hasil	54.244.560.313	1,66	63.836.693.307	1,84	70.485.991.283	1,88	79.586.056.365	2,06	84.041.435.170	1,97	11,65
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	449.506.665.700	13,73	453.004.936.440	13,04	466.574.975.900	12,45	502.766.355.500	13,01	531.053.797.800	12,45	4,29

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, LRA Audited 2020 s/d 2024

Belanja daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.075.980.671.203,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 3.502.512.291.215,- belanja modal sebesar Rp 921.684.246.019,- belanja tidak terduga sebesar Rp45.000.000.000,- dan belanja transfer sebesar Rp 606.784.133.969,-. Sedangkan dalam APBD Tahun 2025 belanja daerah ditetapkan menjadi sebesar Rp4.874.141.976.655,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.371.803.565.732,- belanja modal Rp 804.266.398.854, belanja tak terduga sebesar Rp45.000.000.000, dan belanja transfer sebesar Rp653.072.012.069,-. Sampai dengan Triwulan I tahun 2025, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp 546.338.031.750,- atau terealisasi sebesar 11,21 persen. Realisasi belanja operasi sebesar Rp442.240.464.521,- atau terealisasi sebesar 9,07 persen dengan bobot 80,95 persen dari belanja daerah. Belanja modal terealisasi Rp1.530.000.000,- atau terealisasi sebesar 0,03 persen dengan bobot sebesar 0,28 persen dari belanja daerah. Belanja tidak terduga sebesar Rp546.504.687,- atau terealisasi sebesar 0,01 persen dengan bobot 0,10 persen dari belanja daerah dan belanja transfer Rp102.021.062.542,- atau terealisasi sebesar 2,09 persen dengan bobot 18,67 persen dari belanja daerah.

Selanjutnya, dengan memperhatikan kebijakan untuk mengoptimalkan fiskal dan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat, maka dalam perubahan RKPD Tahun 2025 terhadap belanja daerah dilakukan penyesuaian. Proyeksi belanja daerah dalam perubahan RKPD menjadi sebesar Rp 4.986.389.058.084,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.346.665.245.550,- belanja modal sebesar Rp 929.266.398.854,- belanja tak terduga sebesar Rp 45.000.000.000,- dan belanja transfer sebesar Rp665.457.413.681,-. Secara lebih jelas, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Struktur Belanja pada RKPD 2025, APBD 2025, Realisasi Triwulan I 2025 dan Proyeksi pada P-RKPD 2025

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Realisasi Triwulan I 2025	Persen Distribusi Komponen realisasi tw I	Persen Realisasi (Tw I terhadap RKPD)	Persen Realisasi (Tw I terhadap APBD)	Proyeksi P-RKPD 2025	SELISIH	
									(Proyeksi P-RKPD 2025 dengan Realisasi Tw I)	(Proyeksi P-RKPD 2025 dengan APBD 2025)
5	BELANJA DAERAH	5.075.980.671.203	4.831.372.365.278	546.338.031.750	100,00	10,76	11,31	4.986.389.058.084	4.440.051.026.334	155.016.692.806
5.1	BELANJA OPERASI	3.502.512.291.215	3.329.033.954.355	442.240.464.521	80,95	12,63	13,28	3.375.269.261.550	2.933.028.797.029	46.235.307.195
5.1.01	Belanja Pegawai	1.673.124.565.396	1.657.962.312.392	340.774.617.209	62,37	20,37	20,55	1.659.822.812.392	1.319.048.195.183	1.860.500.000
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.492.784.526.209	1.460.590.636.288	100.748.313.312	18,44	6,75	6,90	1.504.965.443.482,50	1.404.217.130.171	44.374.807.195
5.1.03	Belanja bunga				-		-	-	-	-
5.1.04	Belanja subsidi				-		-	-	-	-
5.1.05	Belanja hibah	335.923.549.610	209.881.305.675	717.534.000	0,13	0,21	0,34	209.881.305.675	209.163.771.675	-
5.1.06	Belanja bantuan sosial	679.650.000	599.700.000		-	-	-	599.700.000	599.700.000	-
5.2	BELANJA MODAL	921.684.246.019	804.266.398.854	1.530.000.000	0,28	0,17	0,19	929.266.398.854	927.736.398.854	125.000.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.000.000.000	45.000.000.000	546.504.687	0,10	1,21	1,21	16.395.984.000	15.849.479.313	- 28.604.016.000
5.4	BELANJA TRANSFER	606.784.133.969	653.072.012.069	102.021.062.542	18,67	16,81	15,62	665.457.413.681	563.436.351.139	12.385.401.612
5.4.01	Belanja bagi hasil	74.010.290.847	84.086.389.769	13.185.446.400	2,41	17,82	15,68	93.089.773.381	79.904.326.981	9.003.383.612
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	532.773.843.122	568.985.622.300	88.835.616.142	16,26	16,67	15,61	572.367.640.300	483.532.024.158	3.382.018.000

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, LRA un Audited Triwulan I 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa selisih belanja daerah pada P-RKPD 2025 terhadap APBD 2025 sebesar Rp155.016.692.806,- yang dialokasikan sebagian besar untuk belanja modal sebesar Rp125.000.000.000,-, belanja operasi sebesar Rp17.631.291.195,- dan belanja transfer sebesar Rp12.385.401.612,- .

Adapun kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: honorarium pegawai honorer/tidak tetap BLUD; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi; belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan belanja beasiswa pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi serta Program Unggulan Kepala Daerah, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
 - a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029;
 - b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang terpilih; dan
 - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kabupaten Deli Serdang pada pelayanan dasar yaitu: pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan anak usia dini; pelayanan Kesehatan ibu hamil, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, pelayanan Kesehatan pada usia produktif, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air

limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten.

3. Efisiensi belanja dan peningkatan kualitas belanja, seperti: mengurangi belanja seremonial, percetakan, mengurangi belanja perjalanan dinas, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki ouput yang terukur.
4. Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah serta penyesuaian kebutuhan penambahan ASN baru dan P3K.
5. Pemenuhan batas minimal alokasi belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, kesehatan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi. Pemenuhan belanja mandatory, seperti : penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Deli Serdang secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;

6. Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs antara lain melalui penurunan prevalensi stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
7. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025;
8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten namun belum menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang terpilih serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam APBD yang berfungsi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diperlukan saat belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan, sementara pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk memanfaatkan surplus anggaran guna kepentingan pembangunan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah harus diarahkan pada upaya penyelesaian berbagai tantangan pembangunan serta pengoptimalan potensi keuangan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, pinjaman daerah, penggunaan dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk investasi dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah serta pembayaran kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih

perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.

Penerimaan pembiayaan selama 5 (lima) tahun berfluktuasi, pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 83.357.990.711, - hingga pada tahun 2024 sebesar Rp 163.097.989.087 Demikian pula halnya dengan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal selama 5 (lima) tahun sebesar Rp4.330.000.000,- Dan pada tahun 2021 sebesar Rp13.416.034.052, hingga pada tahun 2024 telah dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000 Secara lebih jelas, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Lima Tahun Terakhir (2020 s/d 2024)

No	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
6	PEMBIAYAAN DAERAH	79.027.990.711	126.858.764.518	192.512.862.285	174.932.313.585	158.097.989.087
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.357.990.711	140.274.798.570	192.512.862.285	174.932.313.585	163.097.989.087
6.1.01	Silpa Tahun Sebelumnya	83.357.990.711	140.216.596.570	192.378.613.231	174.906.133.422	163.097.989.087
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		58.202.000	134.249.054	26.180.163	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.330.000.000	13.416.034.052	-		5.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal	4.330.000.000	13.416.034.052			5.000.000.000
	Pembiayaan Netto	79.027.990.711	126.858.764.518	192.512.862.285	174.933.313.576	158.097.989.087
	SILPA TA BERKENAAN	140.216.596.570	192.378.613.231	174.906.133.422	163.890.489.087	223.170.152.958

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, LRA Audited 2020 s/d 2024

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2025, nilai pembiayaan netto dalam RKPD Tahun 2025 sebesar Rp27.000.000.000,- dan APBD sebesar Rp 27.000.000.000, serta realisasi penyertaan modalnya sebesar Rp5.000.000.000,- atau terealisasi sebesar 27,78 persen. Secara lebih jelas terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Struktur Pembiayaan pada RKPD 2025, APBD 2025, Realisasi Triwulan I 2025 dan Proyeksi pada P-RKPD 2025

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Realisasi Triwulan I 2025	Persen Distribusi Komponen realisasi tw I	Persen Realisasi (Tw I terhadap RKPD)	Persen Realisasi (Tw I terhadap APBD)	Proyeksi P-RKPD 2025	SELISIH	
									(Proyeksi P-RKPD 2025 dengan Realisasi Tw I)	(Proyeksi P-RKPD 2025 dengan APBD 2025)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000	27.000.000.000	- 5.000.000.000				205.173.696.650	210.173.696.650	178.173.696.650
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	45.000.000.000	-				223.173.696.650	223.173.696.650	178.173.696.650
6.1.01	Silpa Tahun Sebelumnya	45.000.000.000	45.000.000.000	-			-	223.173.696.650	223.173.696.650	178.173.696.650
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah								-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000	100,00	27,78	27,78	18.000.000.000	13.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal	18.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000	100,00	27,78	27,78	18.000.000.000	13.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	27.000.000.000	27.000.000.000	- 5.000.000.000				205.173.696.650	210.173.696.650	178.173.696.650
	SILPA TA BERKENAAN		-	415.050.714.432				-	- 415.050.714.432	-

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, LRA un Audited Triwulan I 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa selisih pembiayaan daerah pada P-RKPD 2025 terhadap APBD 2025 sebesar Rp178.173.696.650,- yang merupakan selisih SILPA tahun sebelumnya,-.

Selanjutnya, gambaran lengkap realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama lima tahun terakhir (2020-2024), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pe mbiayaan Lima Tahun Terakhir (2020 s/d 2024)

No	URAIAN	Realisasi 2020	% Distribusi Komponen 2020	Realisasi 2021	% Distribusi Komponen 2021	Realisasi 2022	% Distribusi Komponen 2022	Realisasi 2023	% Distribusi Komponen 2023	Realisasi 2024	% Distribusi Komponen 2024	Rata-Rata Pertumbuh an
4	PENDAPATAN DAERAH	3.335.349.826.581	100,00	3.539.280.627.629	100,00	3.731.018.449.348	100,00	3.853.330.105.887	100,00	4.330.097.392.111	100,00	6,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	809.719.829.265	24,28	926.137.759.153	26,17	1.041.732.670.188	27,92	1.049.802.528.387	27,24	1.169.363.269.637	27,01	9,76
4.1.01	Pajak Daerah	596.316.675.899	17,88	672.462.837.506	19,00	767.658.224.719	20,58	797.734.218.178	20,70	885.444.485.970	20,45	10,46
4.1.02	Retribusi Daerah	47.643.621.168	1,43	32.397.075.320	0,92	29.221.518.926	0,78	43.129.679.515	1,12	45.003.701.845	1,04	2,53
4.1.03	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.190.194.281	0,49	22.228.003.613	0,63	21.867.488.711	0,59	19.681.368.926	0,51	20.435.467.088	0,47	7,38
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	149.569.337.917	4,48	199.049.842.714	5,62	222.985.437.832	5,98	189.257.261.768	4,91	218.479.614.734	5,05	11,36
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.049.562.028.316	61,45	2.451.655.133.476	69,27	2.687.662.779.160	72,04	2.803.527.577.500	72,76	3.160.734.122.474	72,99	11,57
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.992.315.291.316	59,73	2.451.655.133.476	69,27	2.687.662.779.160	72,04	2.547.684.285.288	66,12	2.909.911.686.357	67,20	10,42
4.2.01	DBH Pajak/ Bukan Pajak	61.232.707.069	1,84	125.659.773.534	3,55	123.584.262.879	3,31	70.132.681.000	1,82	-	-	-
4.2.01	DAU	1.376.847.320.000	41,28	1.354.889.566.000	38,28	1.348.515.058.970	36,14	1.507.732.049.770	39,13	2.535.296.273.557	58,55	19,47
4.2.01	DAK	399.214.595.919	11,97	393.975.208.610	11,13	630.872.162.655	16,91	610.403.014.618	15,84	-	-	11,11
4.2.02	Dana Desa	-	-	312.024.280.840	8,82	323.862.404.000	8,68	347.737.140.900	9,02	352.469.480.800	8,14	-
4.2.02	DID/ Insentif Fiskal	155.020.668.328	4,65	265.106.304.492	7,49	260.828.890.656	6,99	11.679.399.000	0,30	22.145.932.000	0,51	15,87
	TRANSFER ANTAR DAERAH	57.246.737.000	1,72	-	-	-	-	255.843.292.212	6,64	250.822.436.117	5,79	-
4.2.03	DBH Provinsi BKP Provinsi	57.246.737.000	1,72	-	-	-	-	255.843.292.212	6,64	250.822.436.117	5,79	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	476.067.969.000	14,27	161.487.735.000	4,56	1.623.000.000	0,04	-	-	-	-	-
4.3.01	Hibah	167.897.300.000	5,03	2.680.000.000	0,08	1.623.000.000	0,04	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain PD perundang-undangan	308.170.669.000	9,24	158.807.735.000	4,49	-	-	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	3.274.161.220.722	100,00	3.473.760.778.916	100,00	3.748.625.178.211	100,00	3.864.372.930.376	100,00	4.265.025.228.239	100,00	6,87
5.1	BELANJA OPERASI	2.223.407.524.744	67,91	2.424.674.829.910	69,80	2.641.356.377.407	70,46	2.761.112.083.034	71,45	2.981.070.639.968	69,90	7,62
5.1.01	Belanja Pegawai	1.351.706.896.984	41,28	1.315.013.905.179	37,86	1.317.944.293.617	35,16	1.301.585.415.181	33,68	1.390.219.781.592	32,60	0,77
5.1.02	Belanja barang dan jasa	842.395.196.760	25,73	1.068.303.505.091	30,75	1.166.181.224.429	31,11	1.230.270.265.839	31,84	1.299.937.306.713	30,48	11,78
5.1.03	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja hibah	29.305.431.000	0,90	40.423.554.040	1,16	157.230.859.361	4,19	229.142.142.014	5,93	290.833.301.664	6,82	99,89
5.1.06	Belanja bantuan sosial	-	-	933.876.600	0,03	-	-	114.260.000	0,00	80.250.000	0,00	-
5.2	BELANJA MODAL	480.305.325.652	14,67	520.913.969.424	15,00	563.480.586.116	15,03	518.703.185.644	13,42	666.604.042.967	15,63	9,30
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	66.697.144.313	2,04	11.330.338.835	0,33	6.727.247.505	0,18	2.205.249.833	0,06	2.255.312.334	0,05	-
5.4	BELANJA TRANSFER	503.751.226.013	15,39	516.841.629.747	14,88	537.060.967.183	14,33	582.352.411.865	15,07	615.095.232.970	14,42	5,14
5.4.01	Belanja bagi hasil	54.244.560.313	1,66	63.836.693.307	1,84	70.485.991.283	1,88	79.586.056.365	2,06	84.041.435.170	1,97	11,65
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan Surplus/ (Defisit)	449.506.665.700	13,73	453.004.936.440	13,04	466.574.975.900	12,45	502.766.355.500	13,01	531.053.797.800	12,45	4,29
		61.188.605.859	-	65.519.848.713	-	17.606.728.863	-	11.042.824.489	-	65.072.163.871	-	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH	79.027.990.711	0	126.858.764.518	3,65	192.512.862.285	5	174.932.313.585	5	158.097.989.087	3,71	23,38
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.357.990.711	5,41	140.274.798.570	5,41	192.512.862.285	5,41	174.932.313.585	5,41	163.097.989.087	3,82	22,41
6.1.01	Silpa Tahun Sebelumnya	83.357.990.711	-	140.216.596.570	-	192.378.613.231	-	174.906.133.422	-	163.097.989.087	-	22,39
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	58.202.000	-	134.249.054	-	26.180.163	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.330.000.000	5,48	13.416.034.052	0,50	-	-	-	-	5.000.000.000	0,50	-
6.2.02	Penyertaan Modal	4.330.000.000	-	13.416.034.052	-	-	-	-	-	5.000.000.000	-	-
	Pembiayaan Netto	79.027.990.711	-	126.858.764.518	-	192.512.862.285	-	174.933.313.576	-	158.097.989.087	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, LRA Audited 2020 s/d 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang terus meningkat, pada tahun 2020 sebesar Rp3.335.349.826.581 dan tahun 2024 realisasi pendapatan daerah menjadi sebesar Rp 4.330.097.392.111,-, dengan rata-rata pertumbuhan 6,80 persen. Realisasi belanja daerah juga menunjukkan tren yang terus meningkat, pada tahun 2020 sebesar Rp3.274.161.220.722,- dan tahun 2024 menjadi sebesar Rp 4.265.025.228.239,-, dengan rata-rata pertumbuhan 6,87 persen

Selanjutnya proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada P-RKPD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada P-RKPD 2025

No	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	Realisasi Triwulan I 2025	Persen Distribusi Komponen realisasi tw I	Persen Realisasi (Tw I terhadap RKPD)	Persen Realisasi (Tw I terhadap APBD)	Proyeksi P-RKPD 2025	SELISIH	
									(Proyeksi P-RKPD 2025 dengan Realisasi Tw I)	(Proyeksi P-RKPD 2025 dengan APBD 2025)
4	PENDAPATAN DAERAH	5.048.980.671.203	4.804.372.365.278	966.388.746.182	100,00	19,14	20,11	4.781.215.361.434	3.814.826.615.252	- 23.157.003.844
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.742.871.900.227	1.590.489.582.469	171.142.127.345	17,71	9,82	10,76	1.599.788.162.625	1.428.646.035.280	9.298.580.156
4.1.01	Pajak Daerah	1.414.647.479.893	1.264.273.303.335	155.620.604.220	16,10	11,00	12,31	1.264.273.303.335	1.108.652.699.115	-
4.1.02	Retribusi Daerah	96.935.366.704	94.927.225.504	12.309.766.601	1,27	12,70	12,97	94.927.225.504	82.617.458.903	-
4.1.03	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.435.467.088	20.435.467.088	-	-	-	-	20.435.467.088	20.435.467.088	-
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	210.853.586.542	210.853.586.542	3.211.756.524	0,33	1,52	1,52	220.152.166.698	216.940.410.174	9.298.580.156
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.306.108.770.976	3.213.882.782.809	795.246.618.837	82,29	24,05	24,74	3.181.427.198.809	2.386.180.579.972	- 32.455.584.000
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.981.847.435.087	3.009.287.483.000	752.005.379.082	77,82	66,89	66,40	2.991.996.285.000	2.239.990.905.918	- 17.291.198.000
4.2.01	DBH Pajak/ Bukan Pajak	80.638.707.000	85.948.439.000	1.370.456.700	0,14	1,70	1,59	86.003.438.000	84.632.981.300	54.999.000
4.2.01	DAU	1.825.350.964.087	1.870.081.114.000	552.455.620.000	57,17	30,27	29,54	1.858.932.206.000	1.306.476.586.000	- 11.148.908.000
4.2.01	DAK	709.803.256.000	665.802.738.000	151.454.867.840	15,67	21,34	22,75	659.605.449.000	508.150.581.160	- 6.197.289.000
4.2.02	Dana Desa	343.908.576.000	373.382.667.000	46.724.434.542	4,83	13,59	12,51	373.382.667.000	326.658.232.458	-
4.2.02	DID/ Insentif Fiskal	22.145.932.000	14.072.525.000	-	-	-	-	14.072.525.000	14.072.525.000	-
	TRANSFER ANTAR DAERAH	324.261.335.889	204.595.299.809	43.241.239.755	4,47	13,34	21,14	189.430.913.809	146.189.674.054	- 15.164.386.000
4.2.03	DBH Provinsi	324.261.335.889	181.528.963.809	43.241.239.755	4,47	13,34	23,82	181.528.963.809	138.287.724.054	-
	BKP Provinsi	-	23.066.336.000	-	-	-	-	7.901.950.000	-	- 15.164.386.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH									
4.3.01	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain PD perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	5.075.980.671.203	4.831.372.365.278	546.338.031.750	100,00	10,76	11,31	4.986.389.058.084	4.440.051.026.334	155.016.692.806
5.1	BELANJA OPERASI	3.502.512.291.215	3.329.033.954.355	442.240.464.521	80,95	12,63	13,28	3.375.269.261.550	2.933.028.797.029	46.235.307.195
5.1.01	Belanja Pegawai	1.673.124.565.396	1.657.962.312.392	340.774.617.209	62,37	20,37	20,55	1.659.822.812.392	1.319.048.195.183	1.860.500.000
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.492.784.526.209	1.460.590.636.288	100.748.313.312	18,44	6,75	6,90	1.504.965.443.482.50	1.404.217.130.171	44.374.807.195
5.1.03	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja hibah	335.923.549.610	209.881.305.675	717.534.000	0,13	0,21	0,34	209.881.305.675	209.163.771.675	-
5.1.06	Belanja bantuan sosial	679.650.000	599.700.000	-	-	-	-	599.700.000	599.700.000	-
5.2	BELANJA MODAL	921.684.246.019	804.266.398.854	1.530.000.000	0,28	0,17	0,19	929.266.398.854	927.736.398.854	125.000.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	45.000.000.000	45.000.000.000	546.504.687	0,10	1,21	1,21	16.395.984.000	15.849.479.313	- 28.604.016.000
5.4	BELANJA TRANSFER	606.784.133.969	653.072.012.069	102.021.062.542	18,67	16,81	15,62	665.457.413.681	563.436.351.139	12.385.401.612
5.4.01	Belanja bagi hasil	74.010.290.847	84.086.389.769	13.185.446.400	2,41	17,82	15,68	93.089.773.381	79.904.326.981	9.003.383.612
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	532.773.843.122	568.985.622.300	88.835.616.142	16,26	16,67	15,61	572.367.640.300	483.532.024.158	3.382.018.000
	Surplus/ (Defisit)	- 27.000.000.000	- 27.000.000.000	420.050.714.432	-	-	-	- 205.173.696.650	- 625.224.411.082	- 178.173.696.650
6	PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000	27.000.000.000	- 5.000.000.000				205.173.696.650	210.173.696.650	178.173.696.650
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	45.000.000.000	-				223.173.696.650	223.173.696.650	178.173.696.650
6.1.01	Silpa Tahun Sebelumnya	45.000.000.000	45.000.000.000	-	-	-	-	223.173.696.650	223.173.696.650	178.173.696.650
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000	100,00	27,78	27,78	18.000.000.000	13.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal	18.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000	100,00	27,78	27,78	18.000.000.000	13.000.000.000	-
	Pembiayaan Netto	27.000.000.000	27.000.000.000	- 5.000.000.000	-	-	-	205.173.696.650	210.173.696.650	178.173.696.650
	SILPA TA BERKENAAN			- 415.050.714.432					- 415.050.714.432	-

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, LRA un Audited Triwulan I 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp966.388.746.182,-, dan yang telah dibelanjakan sebesar Rp546.338.031.750,- sehingga masih terdapat sisa yang belum dibelanjakan sebesar Rp415.050.714.432,-. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan melakukan percepatan realisasi belanja untuk pencapaian kinerja sehingga pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, pada akhir tahun 2025 diproyeksikan belanja daerah sebesar Rp4.986.389.058.084,- yang dipenuhi melalui pendapatan daerah sebesar Rp4.781.215.361.434,- dan pembiayaan daerah sebesar Rp210.173.696.650,-. Serta dapat terlihat, bahwa peningkatan belanja daerah sebesar Rp155.016.692.806,- yang merupakan pemanfaatan atas SILPA tahun sebelumnya.

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mencari alternatif Pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sumber pendanaan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang selain bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang juga memperoleh dukungan pendanaan dari APBN.

3.3.2 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN pendanaan pembangunan non-APBD Kabupaten Deli Serdang yang lainnya adalah program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan BUMN/BUMD dan perusahaan-perusahaan yang menyalurkan PKBL dan TJSL dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keselarasan program pemerintah daerah dan perusahaan. Dengan demikian,

penyaluran dana tersebut dapat memberikan manfaat dan mencapai tujuan yang telah disusun secara bersama-sama antar lembaga.

3.3.3 Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha.

Kerja sama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerja sama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerja sama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan badan usaha;
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerja sama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
3. Dalam perjanjian kerja sama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
4. Perjanjian kerja sama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. Basis dan perjanjian kerja sama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah;
4. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan melibatkan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget);
- b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak; dan
- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT PII dalam pemberian penjaminan pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor, baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marginal. 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur

sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; dan 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Selanjutnya, secara ringkas dasar perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Dasar Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

NO	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KERANGKA EKONOMI		
a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00-5,21	5,40-5,80
b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,70-6,80	8,26-7,97
c.	Rasio Gini	0,26	0,262-0,260
d.	Indeks Pembangunan Manusia	77,40-77,90	78,27-80,48
e.	Persentase Penduduk Miskin	3,61-3,40	3,44-3,15
f.	Inflasi	2,5+1	2,5+1
g.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,58	3,75
2.	KEUANGAN DAERAH:		
a.	PENDAPATAN	5.048.980.671.20 3	4.781.215.361.43 4
b.	BELANJA	5.075.980.671.20 3	4.986.389.058.08 4
c.	PEMBIAYAAN	27.000.000.000	205.173.696.650
3.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik yang Sehat dan Berkualitas

NO	DASAR PERUBAHAN	RKPD TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
		Pembangunan Sosial melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya
		Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pembangunan Ekonomi yang Sehat, Berkualitas dan Inklusif
		Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Lingkungan yang Sehat, Aman, Nyaman dan Berkelanjutan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa Dasar Perubahan P-RKPD 2025 adalah perubahan asumsi kerangka ekonomi, keuangan daerah dan prioritas daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada P-RKPD 2025 targetnya ditingkatkan dikarenakan target pada RKPD 2025 telah tercapai pada tahun 2024. Serta adanya penyesuaian pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah, serta SILPA tahun 2024 yang akan digunakan pada tahun 2025.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan yang baik mempunyai sasaran dan prioritas yang jelas untuk periode waktu tertentu. Sasaran pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan. Dalam melaksanakan pembangunan, tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing wilayah dan daerah mempunyai keterbatasan, baik dari pendanaan, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lain. Oleh karena itu dalam setiap rencana pembangunan perlu ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Prioritas dan sasaran pembangunan juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia.

Sasaran merupakan rumusan penjabaran dari tujuan organisasi secara lebih spesifik dan terukur dengan fokus utama pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, sementara prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan daerah. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 ini, diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis serta adanya kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti.

Prioritas pembangunan P-RKPD Tahun 2025 ini merupakan prioritas pembangunan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu sampai lima tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dengan kata lain tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai sementara sasaran merupakan tindakan spesifik dan langkah terukur yang perlu diambil untuk mencapai tujuan.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Tema RKP Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut berfokus pada komponen sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah berikut.

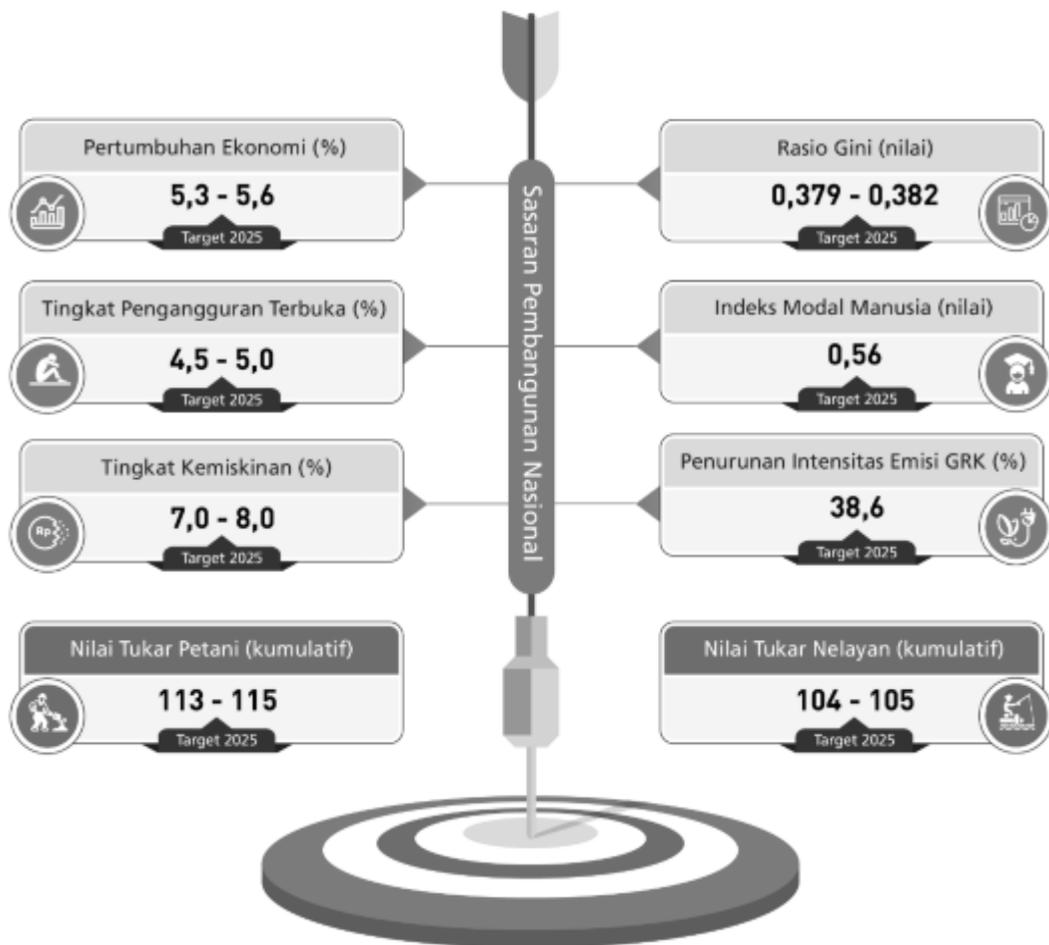


Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Gambar 4.1 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025

4.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pada RKP Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Sasaran pembangunan RKP Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024
Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.1.2.1 Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105.

4.1.2.2 Arah Kebijakan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2025, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan akan berada pada kisaran 4,5–5,0 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga diharapkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah juga akan menurun. Target Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Sumatera berada pada kisaran 4,2–4,7 persen, wilayah Jawa sebesar 5,1–5,6 persen, wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,2–2,7 persen, wilayah Kalimantan sebesar 4,0–4,5 persen, wilayah Sulawesi sebesar 3,2–3,7 persen, wilayah Maluku sebesar 4,6–5,1 persen, dan wilayah Papua sebesar 2,5–3,0 persen. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja; penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; belanja pemerintah yang bersifat padat karya; dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebecerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

4.1.2.3 Arah Kebijakan Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi memengaruhi capaian tingkat nasional. Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu (1) perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan pensasaran program; (2) peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti; (3) penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (4) integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai; (5) penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menysasar kelompok miskin dan rentan; (6) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (7) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan terutama yang berada di luar keluarga.

4.1.2.4 Arah Kebijakan Rasio Gini

Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata.

Kemudian, arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa strategi yang harus di implementasikan. Strategi yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor antara lain melalui (1) pengembangan registrasi sosial-ekonomi; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (5) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (6)

meningkatkan penerimaan pajak dan mulai mengurangi kebijakan terkait relaksasi pajak (tax amnesty); (7) pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah; dan (8) reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan. Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kelompok tersebut dapat mengalami kenaikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok 20 persen teratas. Diharapkan strategi tersebut dapat mengurangi Rasio Gini menjadi lebih kecil dan dapat mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yaitu 0,379-0,382.

4.1.2.5 Arah Kebijakan Indeks Modal Manusia

Indeks Pembangunan Manusia telah digunakan sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia selama kurang lebih 30 tahun terakhir dengan tren meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi capaian dan dampak pembangunan, pengukuran Indeks Pembangunan Manusia masih terbatas pada komponen kuantitas yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta kehidupan layak (pengeluaran per kapita), sehingga dirasa belum mampu mendorong investasi pada unsur sumber daya manusia. Pada perencanaan pembangunan periode 2025-2045 akan digunakan indikator baru yaitu Indeks Modal Manusia yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing sumber daya manusia.

Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Indonesia ditargetkan mencapai nilai 0,56 melalui upaya peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya peningkatan akses kesehatan untuk semua dilakukan melalui (1) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (2) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (3) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Dalam hal akses dan kualitas pendidikan, akan ditingkatkan melalui (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun mencakup perluasan 1 tahun pra-sekolah (perluasan Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang disertai penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi, melalui peningkatan efektivitas bantuan pendidikan,

khususnya bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, berasal dari daerah afirmasi, dan berprestasi; (3) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

4.1.2.6 Arah Kebijakan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai *Net-Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target ambisius tersebut telah terakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dimana diantara lima sasaran utama dalam Visi Indonesia 2045 adalah Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *Net-Zero Emission* dengan target 93,5 persen di tahun 2045. Pada tahun 2025, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan mencapai 38,6 persen. Nilai Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca didapatkan dengan memperhitungkan nilai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca per satuan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon yang selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan koridor berkelanjutan dan transformasi melalui penerapan Ekonomi Hijau yang dilakukan melalui Percepatan Transisi Energi; Ekonomi Sirkular Industri; Terciptanya pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing; serta Pengelolaan Hutan Lestari.

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dilakukan dengan memperkuat program Pembangunan Rendah Karbon yaitu (1) Peningkatan Proporsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Primer, (2) Efisiensi Energi, (3) Peningkatan Transportasi Hijau dan Berkelanjutan, (4) Peningkatan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan, (5) Pencegahan Pengurangan Cadangan Karbon di Kawasan Hutan dan Lahan, (6) Implementasi Praktik Pertanian yang Rendah Karbon, (7) Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru, (8) Pengembangan Industri Hijau, serta (9) Pengelolaan Limbah dan Ekonomi Sirkular.

4.1.2.7 Arah Kebijakan Nilai Tukar Petani

Pada tahun 2025, Nilai Tukar Petani dijaga pada kisaran 113–115. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Petani tersebut

menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi harga yang diterima dan sisi harga yang dibayarkan oleh petani.

Kebijakan dari sisi harga yang diterima berorientasi pada upaya yang meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, serta menjaga stabilisasi harga yang diterima. Kebijakan tersebut mencakup (1) pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan sentra produksi lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian; (2) hilirisasi komoditas pertanian berbasis bioindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas; (3) pengembangan kelembagaan ekonomi petani menjadi korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas produk pertanian; dan (4) pengembangan ketertelusuran produk pertanian bernilai tambah seperti nilai budaya (Globally Important Agricultural Heritage Systems), geografis/endemik (Indeks Geografis), ataupun keberlanjutan (pertanian organik).

Kebijakan dari sisi harga yang dibayar petani berorientasi pada upaya yang menjamin keterjangkauan input usaha tani meliputi (1) modernisasi akses pembiayaan usaha pertanian melalui digitalisasi akses pembiayaan serta kemitraan dengan agen sumber pembiayaan; (2) pengendalian inflasi produk agro input melalui peningkatan produksi dan akses pupuk, pestisida, benih, serta sarana dan prasarana; (3) reformasi subsidi pupuk dan input pertanian lainnya melalui Bantuan Langsung Petani; serta (4) modernisasi pertanian melalui praktik pertanian presisi dan praktik pertanian konservasi agar usaha tani lebih efisien dan berkelanjutan.

4.1.2.8 Arah Kebijakan Nilai Tukar Nelayan

Pada tahun 2025, Nilai Tukar Nelayan dijaga pada kisaran 104–105. Dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Nelayan, upaya yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran nelayan lintas sektoral melalui (1) peningkatan akses nelayan terhadap modal usaha dan sumber daya produktif lainnya seperti bahan bakar minyak bersubsidi, fasilitasi kredit, pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi; (2) peningkatan mutu ikan melalui penguatan sistem rantai dingin dan logistik perikanan, serta tempat pelelangan/pemasaran dengan standar yang memadai sehingga harga ikan terjaga; dan (3) langkah afirmatif lainnya dalam rangka memudahkan nelayan berusaha, seperti mempermudah perizinan, perlindungan nelayan, penguatan kelembagaan korporasi nelayan, pembangunan kampung nelayan, dan sertifikasi awak kapal perikanan.

4.1.2.9 Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

Pada RKP Tahun 2025 tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Saaran ekonomi makro nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1.	Laju Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	1,5-3,5
2.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000-15.400
3.	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5-153,7
4.	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1-6,1
5.	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)-(0,2)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,3-19,6
7.	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,6
8.	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9.	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	11,20-12,00
10.	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00-0,00
11.	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)-(2,80)
12.	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,78-39,30
13.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5-7,8
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2-1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5-842,2

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas, 2024

4.1.3 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, serta RPJMN 2025-2029 guna menjamin terjadinya keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Penjabaran Visi, Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran, selanjutnya menjadi pijakan dalam perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2025.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 merupakan tahap pertama

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2029 yaitu tahap "Penetapan Pondasi Transformasi" menuju pencapaian visi RPJPD "Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan". Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu **"Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan"**.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Utara tahun 2025 yang merujuk pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Inklusif,
- Meratanya Pendidikan Berkualitas

Tujuan 2: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran:

- Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif

Tujuan 3: Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Sasaran:

- Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah
- Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan 4: Ekonomi yang Stabil dan Inklusif

Sasaran:

- Terciptanya Stabilitas Harga
- Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Tujuan 5: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas

Sasaran:

- Menguatnya Birokrasi yang Profesional, adaptif dan Berintegritas
- Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah

Tujuan 6: Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan

Sasaran:

- Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Tujuan 7: Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan
- Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Tujuan 8: Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya

Sasaran:

- Menguatnya Toleransi dan Kerukunan antar Umat Beragama dalam Kehidupan Sosial
- Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah

Lebih jelas terkait tujuan, sasaran beserta indikator kinerja tujuan/sasaran serta target Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja dan Target Kinerja Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET	
					P.RKPD 2025	
1		2	3	4	6	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	Poin	n/a	0,53-0,55	
	1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Inklusif	Angka Kematian Ibu	100.000/KL	n/a	146
			Pravelensi Stunting	Persen	22	21-20
			Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	71,80	90,00

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET
					P.RKPD 2025
1		2	3	4	6
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	85,00	90,00
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	93,61	98,60
		Usia Harapan Hidup	Tahun	73,90	98,60
1.2	Meratanya Pendidikan Berkualitas	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional			
		a. Literasi Membaca	Poin/Skor	n/a	6,06-12,12
		b. Numerasi	Poin/Skor	n/a	0,00-3,03
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional			
		a. Literasi Membaca	Poin/Skor	n/a	35,99-38,49
		b. Numerasi	Poin/Skor	n/a	33,70-36,20
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualitas Pendidikan Tinggi	Persen	n/a	11,12
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	n/a	71,10
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	0,30-10,33
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,61-13,63
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemsikinan	Persen	7,19	6,96-7,16
2.1	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	n/a	29,27
		Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di	Unit	n/a	14

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		
					P.RKPD 2025		
1		2	3	4	6		
		Tingkat kab/kota/provinsi					
		Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,2	5,2		
		PDRB per Kapita	Rp Juta	73,57	78,40		
3	Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,20	5,20		
		PDRB per Kapita	Rp. Juta	73,57	78,40		
3.1	Meningkatnya Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	n/a	5,45		
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,36	19,00-19,50		
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,21	2,42		
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	142,71	200-350		
		Proporsi Jumlah UMKM	Persen		3,20		
		Ekspor Barang dan Jasa	Persen	12,56	16,45-16,54		
		Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	n/a	3,63		
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	n/a	0,79		
		Indeks Inovasi Daerah	Poin/Skor	59,93	57,50-60,01		
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin/Skor	n/a	6		
		3.2	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	n/a	18,42
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin/Skor	n/a	0,562
Indeks Ekonomi Hijau	Poin/Skor			n/a	51,12		
4	Ekonomi yang Stabil dan Inklusif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,6	5,27-5,56		
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20-5,60		
		Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305		

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET
					P.RKPD 2025
1		2	3	4	6
4.1	Terciptanya Stabilitas Harga	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	Poin/Skor	n/a	10,10
		Tingkat Infalsi	Persen	2,21	1,8-3,8
4.2	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	28,65	29,70
		Proporsi Kontribusi PDRB PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	n/a	2,26
		Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	72,75	75,00
		Persentase Desa Mandiri	Persen	3,1	8,44
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	58,54	59,29-61,67
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	n/a	43
		5	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	Poin/Skor
Indek Reformasi Birokrasi	Poin/Skor			n/a	
5.1	Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin/Skor	n/a	3,45
		Indeks Reformasi Hukum	Poin/Skor	n/a	70
		Indeks integritas Nasional	Poin/Skor	n/a	66,78
		Indeks Demokrasi Indonesia	Poin/Skor	n/a	82,58-85,83
		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin/Skor	n/a	82
		Jumlah Kerja Sama Provinsi	Jumlah Kerjasama	n/a	20
		5.2	Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen			n/a	28,77
Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen			n/a	0,13
Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi (Rp)	Rp. Miliar			n/a	8.103.064,03
Total Kredit/PDRB	Persen			n/a	25,7

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET
					P.RKPD 2025
1		2	3	4	6
		Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	n/a	1,24
		Inklusi Keuangan	Persen	n/a	97,52
6	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	n/a	70
6.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	n/a	60
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	n/a	58,50
7	Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Penurunan Emisi GRK			
		a. Kumulatif	Persen	n/a	10,06
		b. tahunan	Persen	n/a	19,04
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin/Skor	73,96	77,20
7.1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Ramah Lingkungan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	85,73	10,00
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	n/a	16
		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	n/a	33
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	73,47	74,36
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	n/a	40,95
		Indeks Resiko Bencana	Poin/Skor	139,84	157,53

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET
					P.RKPD 2025
1		2	3	4	6
7.2	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	373	5,2
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Pravelence of Undermourishment)	Persen	7,54	7,35
		Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	n/a	850
		Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp. Miliar	n/a	170,57
8	Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin/Skor	n/a	71,04
8.1	Menguatnya Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Kehidupan Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin/Skor	80,88	81,17-81,20
8.2	Menguatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Identitas Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin/Skor	n/a	55,44-55,48
		Indeks Ketimpangan Gender	Persen	0,399	0,407

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Pada tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara memiliki 9 (sembilan) Sasaran Makro Pembangunan yang terdiri, sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Sasaran Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,03	5,20-5,60
PDRB Per Kapita	Nilai (Rp. Juta)	73,57	78,40
Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	5,20	5,20
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,19	6,69-7,17
Gini Rasio	Poin	0,306	0,303-0,305

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
Indeks Modal Manusia	Poin	n/a	0,53-0,55
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	n/a	1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	73,96	77,20
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,60	5,27-5,56

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

4.1.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang

Mengingat Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025-2030 dengan periode RPJMD 2025-2029, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dibutuhkan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Perubahan RKP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 adalah:

Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan

Definisi dari visi RPJMD Deli Serdang adalah:

1. **Sehat:** Kabupaten Deli Serdang memiliki akses layanan kesehatan yang modern dan merata di seluruh wilayah. Seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali sehingga masyarakat Deli Serdang menjadi produktif;
2. **Cerdas:** Masyarakat Deli Serdang yang cerdas mampu berpikir kritis dan inovatif sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing secara global;
3. **Sejahtera:** Masyarakat Deli Serdang yang memiliki standar hidup yang layak, di mana mereka mampu semakin makmur dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tidak hanya sejahtera secara ekonomi tapi juga sejahtera secara sosial;
4. **Religius:** Masyarakat Deli Serdang yang taat kepada Tuhan yang Maha

Esa sehingga menciptakan lingkungan yang rukun, aman, nyaman dan harmonis;

- 5. Berkelanjutan:** Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah yang memiliki lingkungan yang asri dan lestari, di mana bebas dari polusi, serta pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga Kabupaten Deli Serdang menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bertempat tinggal.

Pencapaian visi tersebut didukung dengan 4 misi pembangunan jangka menengah yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sehat Pelayanannya Publiknya

Terwujudnya pemerintahan yang profesional, sigap, dan pengayom, serta anti korupsi



Sehat Masyarakatnya

Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat karena semakin terjangkau akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan karakter yang berkualitas



Sehat Ekonominya

Meningkatnya pendapatan masyarakat akibat tersedianya lapangan pekerjaan dan tumbuhnya wirausahawan baru



Sehat Lingkungannya

Meningkatnya kualitas lingkungan untuk hidup secara ideal di Kabupaten Deli Serdang

Gambar 4.3 Misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Penjelasan mengenai masing-masing misi, serta tujuan dan sasarnya diuraikan sebagai berikut:

1. Sehat Pelayanannya Publiknya

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mereformasi tata kelola pemerintahannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan serta akuntabel. Masyarakat akan mudah mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui penerapan sistem berbasis teknologi digital pada setiap aspek pelayanan. Digitalisasi pemerintahan juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM ASN melalui pendidikan dan pengembangan sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari misi ini, yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang profesional, sigap, dan pengayom serta anti korupsi”, di mana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki ASN yang profesional dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik melalui reformasi pada tata kelola pemerintahan sehingga memberikan pelayanan publik yang prima. Terdapat 3 sasaran untuk tujuan ini, yaitu:

- a. Meningkatnya SDM ASN yang profesional dan berintegritas;
- b. Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah;
dan
- c. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Sehat Masyarakatnya

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mempromosikan gaya hidup sehat, berupaya untuk mencegah penyakit, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah, terutama wilayah-wilayah yang terpencil, serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta pencegahan stunting dan gizi buruk pada anak. Upaya ini diharapkan dapat Terwujudnya masyarakat yang produktif, tangguh, dan berkualitas sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan daerah.

Tujuan untuk misi ini, yaitu “Meningkatnya derajat kehidupan

masyarakat karena semakin terjangkaunya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan pembinaan karakter yang berkualitas”. Hal ini berarti seluruh masyarakat dapat merasakan dampak positif dari hasil pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mencakup seluruh lapisan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara inklusif. Pada misi ini terdapat 4 sasaran yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan;
- c. Meningkatnya kualitas karakter masyarakat; dan
- d. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat

3. Sehat Ekonominya

Misi ini menekankan pada peningkatan perekonomian daerah, di mana hal ini akan dicapai melalui pemanfaatan sektor-sektor unggulan daerah. Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan hilirisasi produk-produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan ekspor produk daerah dan bersaing di pasar domestik dan global. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan potensi ekonomi baru, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah akan meningkatkan daya tarik destinasi wisatanya melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan sehingga tidak hanya menarik wisatawan domestik, namun juga wisatawan nasional dan internasional. Dukungan terhadap sektor-sektor tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan hal yang sama. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan investasi pada daerahnya sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah.

Tujuan untuk mendukung misi tersebut, yaitu “Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan tumbuhnya wirausahawan baru”, di mana Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan perekonomian daerahnya melalui peningkatan investasi, terkhusus pada sektor unggulan daerah, serta meningkatkan jumlah wirausaha daerah yang akan berpengaruh bagi peningkatan lapangan pekerjaan daerah dan pendapatan masyarakat. Terdapat 7 sasaran untuk mendukung tujuan tersebut, yaitu:

- a. Penurunan angka pengangguran;
- b. Penurunan angka kemiskinan;
- c. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok;
- d. Meningkatnya hilirisasi dan ekspor produk industri;

- e. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan;
- f. Meningkatnya jumlah wirausaha; dan
- g. Meningkatnya kemandirian desa.
- h. Meningkatnya nilai investasi.
- i. Meningkatnya kemandirian daerah.
- j. Meningkatnya ketahanan pangan.

4. Sehat Lingkungannya

Pembangunan yang dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan isu lingkungan saat ini. Pembangunan akan difokuskan pada pembangunan yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan sehingga menjaga kelestarian sumber daya alam. Infrastruktur yang dibangun juga memenuhi kualitas yang unggul, ikonik dan tahan terhadap risiko bencana serta perubahan iklim sehingga memitigasi dampaknya terhadap masyarakat. Sehat Lingkungannya juga berarti bahwa Deli Serdang menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi masyarakat, di mana masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, damai dan bebas dari tindak kriminalitas. Masyarakat memiliki jiwa sosial yang tinggi, rukun, damai dan rasa kebhinekaan.

Tujuan dari misi ini, yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan untuk hidup secara ideal di Kabupaten Deli Serdang” yang berarti masyarakat dapat bertempat tinggal secara aman, nyaman, dan harmonis, serta memiliki kualitas lingkungan hidup yang layak pada setiap wilayahnya.

Tujuan ini memiliki 4 sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas;
- b. Meningkatnya daerah yang aman dan kondusif;
- c. Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana; dan

Tujuan dan sasaran serta indikatornya pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Indikator dan targetnya pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET 2025						
						Rankhit RPJMD	RKPD	P-RKPD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan												
1	Sehat Pelayanan Publiknya	1.1	Terwujudnya pemerintahan yang profesional, sigap, dan pengayom serta anti korupsi		Indeks Reformasi Birokrasi	poin	76,78	77,00	71,40	77,00		
				1.1.1	Meningkatnya SDM ASN yang profesional dan berintegritas	1	Indeks Profesionalitas ASN	poin	72,11	73,00	-	73,00
						2	Indeks Integritas Nasional	angka	64,70	66,78	-	66,78
				1.1.2	Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	90,25	90,45	85,00	90,45
						4	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digita;	poin	3,57	4,08	-	4,08/1,60
						5	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,53	4,55	-	4,55
				1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	6	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	71,79	72,00	73,00	72,00
						7	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP	level	3,00	3,00	-	3,00
						8	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP
				2	Sehat Masyarakatnya	2.1	Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat karena semakin terjangkaunya akses		Indeks Pembangunan Manusia	poin	77,56	78,27-80,48

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET 2025			
							Rankhit RPJMD	RKPD	P-RKPD	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan pembinaan karakter yang berkualitas							
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	Umur Harapan Hidup	tahun	73,81	73,78 - 73,91	73,65	73,78 - 73,91
				10	Prevalensi stunting	persen	23,2/0,16	22/0,12		22/0,12
		2.1.2	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	11	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	10,29	10,58 - 10,93	10,30	10,58 - 10,93
				12	Harapan lama sekolah	tahun	13,40	13,49 - 13,69	13,39	13,49 - 13,69
		2.1.3	Meningkatnya kualitas karakter masyarakat	13	Indeks Pembangunan Keluarga	poin	62,41	60,32 - 71,12	-	60,32 - 71,12
				14	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,325 (2023)	0,316-0,318	-	0,316-0,318
		2.1.4	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	15	Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan	persen	86,63	91,32	-	91,32
				16	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	persen	29,04	30,00	-	30,00
3	Sehat Ekonominya	3.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan tumbuhnya wirausahawan baru		PDRB Per Kapita	Rp. Juta	73,93	76,44	-	76,44
					Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,36	5,40-5,80	5,00-5,21	5,40-5,80
					Gini Ratio	angka	0,262	0,261 - 0,260	0,26	0,262 - 0,260

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET 2025			
							Rankhit RPJMD	RKPD	P-RKPD	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		3.1.1	Penurunan angka pengangguran	17	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,02	8,26 - 7,97	7,70-6,80	8,26 - 7,97
		3.1.2	Penurunan angka kemiskinan	18	Tingkat Kemiskinan	persen	3,44	3,44-3,15	3,61-3,40	3,44-3,15
		3.1.3	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok	19	Tingkat Inflasi	persen	1,80	2,5±1	2,5±1	2,5±1
		3.1.4	Meningkatnya hilirisasi dan ekspor produk industri	20	Rasio PDRB Industri Pengolahan	persen	28,95	29,97-30,43	-	29,97-30,43
				21	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	n/a	5,00 - 7,00	-	5,00 - 7,00
		3.1.5	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan	22	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	11,13	10,98	-	10,98
		3.1.6	Meningkatnya jumlah wirausaha	23	Rasio Kewirausahaan	persen	2,52	2,61	-	2,61
		3.1.7	Meningkatnya kemandirian desa	24	Persentase Desa Mandiri	persen	7,10	7,33	-	7,33
		3.1.8	Meningkatnya nilai investasi	25	Persentase Peningkatan Investasi	persen	56,07	1,00	-	1,00
		3.1.9	Meningkatnya tingkat kemandirian daerah	26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,585	0,580 - 0,612	-	0,580 - 0,612
3.1.10	Meningkatnya ketahanan pangan	27	Indeks Ketahanan Pangan	angka	86,20	87,30	-	87,30		
4	Sehat Lingkungannya	4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan untuk hidup secara ideal		Indeks Rasa Aman	angka	83,15	83,47	81,79	83,47
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	63,45	72,50	72,50	72,50
		4.1.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	28	Indeks Infrastruktur	poin	n/a	75	-	75

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET 2025		
								Rankhit RPJMD	RKPD	P-RKPD
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4.1.2	Meningkatnya daerah yang aman dan kondusif	29	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	poin	n/a	61,00	-	61,00
				30	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	80,04	80,99	78,90	80,99
				31	Indeks Perlindungan Anak	angka	61,14 (2023)	61,20	-	61,20
		4.1.3	Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	32	Indeks Risiko Bencana	poin	107,20	106,68	-	106,68
				33	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	61,38	61,50	62,00	61,50

Tujuan dan sasaran pembangunan P-RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025, diarahkan untuk pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, mengingat Kabupaten Deli Serdang merupakan satu kesatuan atau bagian dari perencanaan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah juga ditujukan untuk pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD, selain memuat indikator makro dan IKK, juga memuat indikator utama pembangunan yang tercantum pada RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045 yang belum tercantum pada IKU, yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045.

4.2 Target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

4.2.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Deli Serdang

Indikator makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Rasio Gini. Indikator makro menjadi salah satu parameter keberhasilan pembangunan di Deli Serdang. Selain itu, indikator makro Kabupaten Deli Serdang juga menjadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional.

Realisasi Indikator kinerja makro Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 s/d 2025 Triwulan I serta proyeksinya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Makro Kabupaten Deli Serdang pada P-RKPD Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Realisasi					Target 2025		
			2021	2022	2023	2024	2025 Tw I	Rankhir RPJMD	RKPD	P. RKPD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,23	4,70	5,34	5,36	5,36	5,40-5,80	5,00-5,21	5,40-5,80
2	PDRB per Kapita	Rp juta	59,39	65,27	68,92	73,93	-	76,44	-	76,44
3	Kontribusi PDRB	%	13,24	13,29	13,30	13,20	-	13,22	-	13,22

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Realisasi					Target 2025		
			2021	2022	2023	2024	2025 Tw I	Rankhir RPJMD	RKPD	P. RKPD
4	Tingkat Kemiskinan	%	4,01	3,62	3,44	3,44	3,44	3,44-3,15	3,61-3,40	3,44-3,15
5	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	9,13	8,79	8,62	8,02	8,02	8,26-7,97	7,70-6,80	8,26 - 7,97
6	Rasio Gini / Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,263	0,270	0,295	0,262	0,262	0,261-0,260	0,260	0,262 - 0,260
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,21	76,86	77,16	77,56	77,56	78,27-80,48	77,40-77,90	78,27-80,48
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2Eq)	Ton CO2Eq	-	-	-	-	-	186.964,85	-	186.964,85
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	59,00	57,37	61,18	63,45	-	72,50	72,50	72,50

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Deli Serdang

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD. Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Deli Serdang yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2025-2029. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang.

IKU pemerintah daerah, disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Deli Serdang pada P-
RKPD Tahun 2025**

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET 2025		
				RPJMD	RKPD	P-RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	67,11 (2023)	70,00	71,40	70,00
2	Indeks Profesionalitas ASN	poin	72,11	73,00	-	73,00
3	Indeks Integritas Nasional	angka	64,70	66,78	-	66,78
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	90,25	90,45	85,00	90,45
5	Indeks SPBE	poin	3,57	4,08	-	4,08
6	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,53	4,55	-	4,55
7	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	71,79	72,00	73,00	72,50
8	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP	level	3,00	3,00	-	3,00
9	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Indeks Pembangunan Manusia	poin	77,56	78,27-80,48	77,40-77,90	78,27-80,48
11	Umur Harapan Hidup	tahun	73,81	73,78 - 73,91	73,65	73,78 - 73,91
12	Prevalensi stunting	persen	23,2/0,16	22/0,12		22/0,12
13	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	10,29	10,58 - 10,93	10,30	10,58 - 10,93
14	Harapan lama sekolah	tahun	13,40	13,49 - 13,69	13,39	13,49 - 13,69
15	Indeks Pembangunan Keluarga	poin	62,41	60,32 - 71,12	-	60,32 - 71,12
16	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,325 (2023)	0,316-0,318	-	0,316-0,318
17	Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan	persen	86,63	91,32	-	91,32
18	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	persen	29,04	30,00	-	30,00
19	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	73,93	76,44	-	76,44
20	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,36	5,40-5,80	5,00-5,21	5,40-5,80
21	Gini Ratio	angka	0,262	0,261 - 0,260	0,26	0,261 - 0,260
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,02	8,26 - 7,97	7,70-6,80	8,26 - 7,97
23	Tingkat Kemiskinan	persen	3,44	3,44-3,15	3,61-3,40	3,44-3,15
24	Tingkat Inflasi	persen	1,80	2,5±1	2,5±1	2,5±1
25	Rasio PDRB Industri Pengolahan	persen	28,95	29,97-30,43	-	29,97-30,43
26	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	n/a	5,00 - 7,00	-	5,00 - 7,00

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET 2025		
				RPJMD	RKPD	P-RKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	11,13	10,98	-	10,98
28	Rasio Kewirausahaan	persen	2,52	2,61	-	2,61
29	Persentase Desa Mandiri	persen	7,10	7,33	-	7,33
30	Persentase Peningkatan Investasi	persen	56,07	1,00	-	1,00
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,585	0,580 - 0,612	-	0,580 - 0,612
32	Indeks Rasa Aman	angka	83,15	83,47	81,79	83,47
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	63,45	72,50	72,50	72,50
34	Indeks Infrastruktur	poin	n/a	75	-	75
35	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	poin	n/a	61,00	-	61,00
36	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	80,04	80,99	78,90	80,99
37	Indeks Perlindungan Anak	angka	61,14 (2023)	61,20	-	61,20
38	Indeks Risiko Bencana	poin	107,20	106,68	-	106,68
39	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	61,38	61,50	62,00	62,00
40	Indeks Ketahanan Pangan	angka	86,20	87,30	87,55	87,55

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2025

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut cascading yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi (*impact*) sampai paling rendah (*output*). Adapun capaian dan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Deli Serdang pada P-RKPD Tahun 2025

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	87,30	Indeks Ketahanan Pangan	87,30
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	0,18	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	0,18
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,50
4	Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	84,60	Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	84,60
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	61,50	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	61,50
6	Penurunan Emisi GRK	186.964,85	Penurunan Emisi GRK	186.964,85
7	Indeks Risiko Bencana	106,68	Indeks Risiko Bencana	106,68
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,40-5,80	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,40-5,80
2	Tingkat Kemiskinan	3,44-3,15	Tingkat Kemiskinan	3,44-3,15
3	PDRB Per Kapita	76,44	PDRB Per Kapita	76,44
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,26 - 7,97	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,26 - 7,97
5	Indeks Gini	0,261 - 0,260	Indeks Gini	0,261 - 0,260
6	Indeks Pembangunan Manusia	78,27-80,48	Indeks Pembangunan Manusia	78,27-80,48
7	Umur Harapan Hidup	73,78 - 73,91	Umur Harapan Hidup	73,78 - 73,91
8	Indeks Keluarga Sehat	1	Indeks Keluarga Sehat	1
9	Prevalensi Stunting	22/0,12	Prevalensi Stunting	22/0,12
10	Rata-Rata Lama Sekolah	10,58 - 10,93	Rata-Rata Lama Sekolah	10,58 - 10,93
11	Harapan Lama Sekolah	13,49 - 13,69	Harapan Lama Sekolah	13,49 - 13,69
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,23
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	30,00	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	30,00

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,99	Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,99
15	Indeks Pemenuhan Hak Anak	57,85	Indeks Pemenuhan Hak Anak	57,85
16	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,32 - 71,12	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,32 - 71,12
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,41 - 0,45	Indeks Ketimpangan Gender	0,41 - 0,45
18	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	22,25 - 23,50	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	22,25 - 23,50
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	29,97-30,43	Rasio PDRB Industri Pengolahan	29,97-30,43
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	2,36-2,53	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	2,36-2,53
3	Rasio Kewirausahaan	2,61	Rasio Kewirausahaan	2,61
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,00	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,00
5	Indeks Inovasi Daerah	67,49 - 67,94	Indeks Inovasi Daerah	67,49 - 67,94
6	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,22	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,22
7	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	58,30	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	58,30
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,00 - 31,00	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,00 - 31,00
9	Ekspor Barang dan Jasa	5,00 - 7,00	Ekspor Barang dan Jasa	5,00 - 7,00
10	Indeks Infrastruktur	75	Indeks Infrastruktur	75
11	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	40,95	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	40,95
12	Persentase Desa Mandiri	7,33	Persentase Desa Mandiri	7,33
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,580 - 0,612	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,580 - 0,612
14	Tingkat Inflasi	2,5±1	Tingkat Inflasi	2,5±1
ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,08	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,08
2	Indeks Pelayanan Publik	4,55	Indeks Pelayanan Publik	4,55
3	Indeks Integritas Nasional	66,78	Indeks Integritas Nasional	66,78
4	Persentase Penegakan Perda	70,00	Persentase Penegakan Perda	70,00
5	Persentase Capaian Aksi HAM	70,00	Persentase Capaian Aksi HAM	70,00
6	Indeks Demokrasi Indonesia	sedang	Indeks Demokrasi Indonesia	sedang
7	Indeks Rasa Aman	83,47	Indeks Rasa Aman	83,47
8	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	61,00	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	61,00
9	Indeks Daya Saing Daerah	3,80	Indeks Daya Saing Daerah	3,80
INDIKATOR KINERJA KUNCI				

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pendidikan		Pendidikan	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	71,38	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	71,38
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,13
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97,52	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97,52
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	29,13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	29,13
B.	Kesehatan		Kesehatan	
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,55	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,55
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100
C	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang		Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;	1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;	1
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	79	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	79
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic;	84,6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic;	84,6
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota;	77	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota;	77
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;	1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;	1
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	22,17	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	22,17
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,97	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,97

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Persentase peningkatan rumah layak huni dan terjangkau	1,20	Persentase peningkatan rumah layak huni dan terjangkau	1,20
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	8,17	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	8,17
E	Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;	83	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;	83
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	70	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	70
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;	100	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15
8	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran	230	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran	230
9	Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	10	Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	10
	Kegiatan Pelaksanaan PAM	30	Kegiatan Pelaksanaan PAM	30
F	Sosial		Sosial	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	100	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	100
G	Tenaga Kerja		Tenaga Kerja	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	87	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	87
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	90,3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	90,3
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	73	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	73
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota;	76	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota;	76
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12,00	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	12,00
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,77
I	Pangan		Pangan	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras);	160,55	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras);	160,55
J	Pertanahan		Pertanahan	
1	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100
K	Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,50
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	65	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	65
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	30	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	30
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Perekaman KTP elektronik	100	Perekaman KTP elektronik	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60
3	Kepemilikan akta kelahiran	100	Kepemilikan akta kelahiran	100

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama;	11	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama;	11
M	Pemberdayaan Masyarakat dan desa		Pemberdayaan Masyarakat dan desa	
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	Persentase pengentasan desa tertinggal	-
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	19,21	Persentase peningkatan status desa mandiri	19,21
N	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,27	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,27
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,5
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,1
O	Perhubungan		Perhubungan	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	51	Rasio konektivitas kabupaten/kota	51
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,40	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,40
P	Komunikasi dan Informatika		Komunikasi dan Informatika	
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;	100	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;	50	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;	50
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;	83	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;	83
Q	Koperasi, usaha kecil dan menengah		Koperasi, usaha kecil dan menengah	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas;	2,91	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas;	2,91
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha;	2,61	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha;	2,61

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
R	Penanaman Modal		Penanaman Modal	
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota;	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota;	1
S	Kepemudaan dan Olahraga		Kepemudaan dan Olahraga	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;	25	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;	25
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;	30	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;	30
3	Peningkatan prestasi olahraga	100	Peningkatan prestasi olahraga	100
T	Statistik		Statistik	
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	62	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	62
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;	63	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;	63
U	Persandian		Persandian	
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah;	2	Tingkat keamanan informasi pemerintah;	2
V	Kebudayaan		Kebudayaan	
1	Terlestarikannya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda	25	Terlestarikannya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda	25
W	Perpustakaan		Perpustakaan	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,90	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	66,90
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,23
X	Kearsipan		Kearsipan	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	60	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	60
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			publik dan kesejahteraan rakyat	
Z	Kelautan dan Perikanan		Kelautan dan Perikanan	
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	93.794	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	93.794
AA	Pariwisata		Pariwisata	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	35	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	35
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota;	3,7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota;	3,7
3	Tingkat hunian akomodasi;	0,25	Tingkat hunian akomodasi;	0,25
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,5
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7,8
AD	Perdagangan		Perdagangan	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan);	60	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan);	60
2	Persentase kinerja realisasi pupuk;		Persentase kinerja realisasi pupuk;	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku;	95	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku;	95
AE	Perindustrian		Perindustrian	
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota;	4.510	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota;	4.510
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	56	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	56
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait;	56	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait;	56
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota;	56	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota;	56
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini;	70	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini;	70
AF	Perencanaan dan Keuangan		Perencanaan dan Keuangan	
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan;	18	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan;	18
2	Rasio PAD	30	Rasio PAD	30
		27,81		27,81
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);	3,2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);	3,2
4	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);	3,3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);	3,3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures);	65	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures);	65
6	Opini Laporan Keuangan;	WTP	Opini Laporan Keuangan;	WTP
AG	Pengadaan		Pengadaan	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama;	-	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama;	-
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif;	4,9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif;	4,9
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	15	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	15
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan	-7,4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan	-7,4

NO.	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA P-RKPD TAHUN 2025		INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PADA RANCANGAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025	
	INDIKATOR	TARGET KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah		Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	
AH	Kepegawaian		Kepegawaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	91,14	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	91,14
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12,65	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12,65
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,65	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,65
AI	Manajemen Keuangan		Manajemen Keuangan	
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10
2	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	30	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	30
3	Manajemen Aset	4	Manajemen Aset	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5

4.3 Kegiatan Strategis Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Kegiatan strategis daerah merupakan kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dan dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029.

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri sebanyak 3 unit sampai dengan tahun 2027.
2. Pembangunan ruang kelas SD sebanyak 247 unit sampai dengan tahun 2029.
3. Pembangunan ruang kelas SMP sebanyak 10 unit sampai dengan tahun 2029.
4. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada 100 siswa di tahun 2025 dan 500 siswa per tahun pada tahun 2026-2029.
5. Pemberian beasiswa kepada 1000 siswa per tahun pada tahun 2025-2029.

6. Peningkatan sekolah terakreditasi minimal B sesuai SNP (PAUD: 63,63%; SD: 87,54%; SMP: 95,39%) pada tahun 2029.
7. Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 mencapai 64% pada tahun 2029.
8. Pembangunan/rehab toilet sekolah negeri tuntas pada tahun 2025.
9. Pelayanan pendidikan kepada ABK di Deli Serdang pada tahun 2025-2029.
10. Dukungan penyelenggaraan sekolah unggulan pada tahun 2025-2029.
11. Peningkatan kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas.

B. URUSAN KESEHATAN

1. Pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Universal Health Coverage) pada tahun 2025 mencapai 98.6%
2. Implementasi Program Layanan Kesehatan Pasien Unregister dan Lain-Lain (PAS PULA) tahun 2025-2029
3. Upaya penurunan Angka Kematian Ibu menjadi 8/KH pada tahun 2029
4. Upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 1,42 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2029
5. Upaya penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita menjadi 0,04 (e-PPGBM) pada tahun 2029
6. Upaya penurunan Insidensi Tuberkulosis menjadi 84.6 per 100.000 penduduk pada tahun 2029
7. Peningkatan kapasitas seluruh Puskesmas menjadi ILP pada tahun 2025
8. Upaya pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) menjadi pra sehat mulai tahun 2025 (IKS 0,5 s.d 0,8)
9. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasyankes di atas 80% pada tahun 2027
10. Peningkatan kapasitas RSUD dan Puskesmas :
 - RS Drs. H. Amri Tambunan menjadi kelas A tahun 2027, paripurna tahun 2028.
 - RS Pancur Batu menjadi kelas B tahun 2029, paripurna tahun 2030.
 - RS Bangun Purba menjadi kelas C pada tahun 2029, paripurna tahun 2030.
 - Pembangunan baru RS di Kecamatan Hamparan Perak dalam proses pencarian tanah karena dari hasil analisis lahan Puskesmas Hamparan Perak saat ini tidak layak untuk dinaikkan menjadi RS Kelas D.
 - Puskesmas direncanakan akan bertambah 1 unit tahun 2027 di Kecamatan Percut Sei Tuan, paripurna tahun 2029.
 - 33 Puskesmas direakreditasi tahun 2028 dengan target paripurna.

- Puskesmas Sialang direakreditasi pada tahun 2029 dengan target paripurna.

C. URUSAN PELKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penurunan timbunan sampah sebesar 68% tahun 2029
2. Penanganan jalan dalam kondisi baik mencapai 81% pada tahun 2029 (dalam mendukung program unggulan JUMPA DIA)
3. Pemenuhan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sebesar 58,8% tahun 2029
4. Pemenuhan rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 81,50% tahun 2029
5. Pemenuhan rumah tangga dengan akses sanitasi sebesar 87,97% tahun 2029
6. Pembangunan Alun-Alun Tiap Kecamatan (ATK):
 - ATK pada 4 Kecamatan (Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Galang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Percut Sei Tuan) pada tahun 2025
 - ATK pada 6 kecamatan pada tahun 2026
 - ATK pada 4 kecamatan pada tahun 2027
 - ATK pada 4 kecamatan pada tahun 2028
 - ATK pada 4 kecamatan pada tahun 2029

D. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Peningkatan pelayanan ketentraman, ketertiban umum masyarakat melalui optimalisasi kinerja Satpol PP, BPBD, Damkarmat dan Bakesbangpol (Indeks Trantibumlinmas).

E. URUSAN KETENAGAKERJAAN

1. Penurunan angka pengangguran tahun 2029 sebesar 7,89-7,57%
2. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebesar 62,5% pada 2025 dan 73% pada Tahun 2029
3. Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)

F. URUSAN INFORMATIKA

1. Penyelenggaraan semua jenis layanan Program PATEN KALI di seluruh kecamatan tahun 2026 (Bagian Tapem, Bagian Organisasi, OPD Pelayanan Publik dan Kecamatan).

2. Penguatan layanan publik berbasis digital sampai ke seluruh desa/kelurahan tahun 2027 (Dinas Kominfo, Perpustakaan Arsip, Bagian Organisasi, Dinas PMD, Kecamatan dan Kelurahan).
3. Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua lingkup Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2027 (Dinas Kominfo, seluruh OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan).

G. URUSAN PENANAMAN MODAL

Persentase peningkatan investasi ditargetkan meningkat sebesar 6,67% sampai tahun 2029

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA- BIDANG KEBUDAYAAN-BIDANG PARIWISATA

1. Peningkatan prestasi di bidang olahraga (Porkab, Porprov, PON)
2. Dukungan terhadap penyelenggaraan event budaya, pariwisata dan keagamaan

I. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Target Tahun 2025 29,97-30,43% dan di 2029 sebesar 32,32-32,96%;
2. Paket bantuan pasar murah bagi masyarakat miskin dalam hari besar keagamaan tahun 2025-2029 (Program Dukungan bagi Masyarakat Rentan Ekonomi);
3. Revitalisasi pasar menjadi pasar SNI sebanyak 10 pasar tahun 2025-2029 (Program Dukungan bagi masyarakat Rentan Ekonomi).

J. URUSAN PERTANIAN

1. Produksi padi sawah sebanyak 446.425 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Pantai Labu dan Tanjung Morawa.
2. Produksi cabai merah sebanyak 6.298 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan Beringin, Pagar Merbau dan STM Hulu.
3. Produksi pisang barangan sebanyak 5.220 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan STM Hilir, STM Hulu, pengembangan di Kecamatan Kutalimbaru.
4. Produksi salak sebanyak 3.446 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan STM Hulu, pengembangan di Kecamatan Kutalimbaru.

5. Produksi kelapa sawit sebanyak 248.219 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan Bangun Purba, STM Hilir, STM Hulu, Kutalimbaru, Hamparan Perak, Pagar Merbau dan Galang.
6. Produksi karet dengan produksi angka sementara 2023 4,564 ton sentra di Kecamatan Bangun Purba, Biru-Biru, Galang, Gunung Meriah, Kutalimbaru, STM Hulu, STM Hilir.
7. Jumlah populasi sapi sebanyak 93.848 ekor pada tahun 2029 dengan sentra sapi di Kecamatan Hamparan Perak, daerah pengembangan di Kecamatan STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Biru-Biru, STM Hilir, Bangun Purba, Galang, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu dan Pagar Merbau.
8. Jumlah populasi unggas sebanyak 25.746.670 ekor tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan Pantai Labu.

K. URUSAN PERIKANAN

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target pada tahun 2029 menjadi 55.272 ton, melalui :
 - Pemenuhan jumlah sarana, prasarana melalui pembangunan tempat tambatan sampan (tangkahan) sampai dengan 2029 total 5 unit dan Untuk Tahun 2025 awalnya direncanakan pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak sebanyak 1 unit. Namun setelah dilakukan survey ternyata kondisi lapangan tidak memenuhi syarat teknis dalam pembangunan TPI sehingga diusulkan untuk diganti menjadi pembangunan tempat tambat sampan atau tangkahan.
 - Pemenuhan sebagai tempat bengkel sampan nelayan dengan membangun docking sampan Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 3 unit terdiri 2 unit Kecamatan Pantai Labu dan 1 unit Percut Sei Tuan
 - Pemenuhan pengadaan alat tangkap ikan, mesin dan sampan sampai dengan 2029 total keseluruhan 6.211 unit .
 - Rehabilitasi sedang/berat Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu sebanyak 1 unit dan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 1 Unit. Untuk tahun 2026 di rencanakan 1 unit di desa rantau panjang Kecamatan Pantai Labu
2. Peningkatan produksi perikanan air tawar dengan target pada tahun 2029 menjadi 63.648 ton, melalui:
 - Pemenuhan pembangunan unit pembenihan rakyat (UPR) tahun 2025-2029 total 9 unit dan (UPR bertujuan meningkatkan produksi benih ikan berkualitas serta meningkatkan pendapatan masyarakat).

- Rehabilitasi/pembangunan leaning kolam, pagar dan mess di balai benih ikan (BBI) di kecamatan tanjung morawa dan percut sei tuan .
 - Pengadaan sarana pendukung budidaya ikan tahun 2025-2029 total 75 unit
 - Pemenuhan pengadaan pakan ikan dan bahan baku pembuatan pakan ikan (Tahun 2025-2029 total keseluruhan 300 Ton).
 - Peningkatan produksi benih ikan dari balai benih ikan air tawar tahun 2025-2029 total 8.500.000 ekor.
3. Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dengan target sampai dengan tahun 2029 sebesar 3.637 ton, melalui:

Peningkatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada tahun 2025-2029 dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan total 40 unit (UPI bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah perikanan dan meningkatkan pendapatan masyarakat).

4.4 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dan Provisni Sumatera Utara

Sebagai agregat Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, Kabupaten Deli Serdang mendukung capaian RPJMN Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 melalui Program Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025. Dukungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara

No.	RPJMN Tahun 2025-2029	P. RKP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	Rankhir Perubahan RKP Provinsi Tahun 2025
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pencegahan dan pemberantasan korupsi Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Program CTM (Cepat, Transparan, Mudah)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Program Paten Kali (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Lengkap dan Elektronik)	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat
3	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Program Deli Serdang Sehat	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu
4	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Program Evoria (even olah raga, seni budaya dan keagamaan)	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)
5	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya;	Program Mudah Kreasi, Pengembangan di Bidang Ekonomi Kreatif melalui Penyediaan Workspace Gratis, Sertifikat Pelatihan, Kerjasama/Mitra Pemerintah	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal
6		Program Kemudahan Berusaha UMKM/IKM	
7	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Program Kemudahan Perizinan Investasi	

No.	RPJMN Tahun 2025-2029	P. RKPD Kabupaten deli Serdang Tahun 2025	Rankhir Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;	Program Pemula (pendidikan murah dan berkualitas). SD dan SMP unggulan, kuota mahasiswa daerah, bantuan perlengkapan sekolah, insentif pembangunan sekolah atau gedung baru	
9		Program Guru Senyum (Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan)	
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Program Dukungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi
11		Program Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas	
12	Pemberantasan kemiskinan	Program Peningkatan Keahlian Buruh Harian Lepas	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran
13		Program Percepatan Pencetakan Wirausaha Baru dan Pendampingannya	
14		Program Pendampingan Kerja Luar Negeri	
15		Program Dukungan bagi Masyarakat Rentan Sosial Ekonomi	
16		Program Mudah Kerja (warga miskin mendapat kuota khusus melamar pekerjaan)	
17	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	Program Pembangunan Pertanian Menuju Swasembada Pangan	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru
			Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal

No.	RPJMN Tahun 2025-2029	P. RKPD Kabupaten deli Serdang Tahun 2025	Rankhir Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
(1)	(2)	(3)	(4)
18		Program Jumpa Dia (Jalan Utama Pasti Mantap di Deli Serdang)	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal
19		Program Patroli Lingkungan	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib
20		Program Mudah Berpartisipasi	
21	Pencegahan dan pemberantasan narkoba Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	Program Bina Mental Remaja dan Akhlak Masyarakat	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun
22	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Program Sakolah (Sampah Kita Olah)	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana
23	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Program Rumah Sehat (tersedia jaringan air minum, sanitasi dan drainase)	
24		Program Rusunawa dalam Kota	

BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan didasarkan pada kebutuhan dan dinamika yang berkembang pada tahun berjalan. Tentunya implementasi berbagai program maupun kegiatan yang bersifat prioritas ini tetap memperhatikan kemampuan keuangan (*fiscal capacity*) daerah dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, prioritas pembangunan daerah ini disinkronisasikan berdasarkan hasil masukan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD, serta dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Deli Serdang dijabarkan dalam Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas: a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah; b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; d) Urusan pilihan; e) Unsur pendukung urusan pemerintahan; f) Unsur penunjang urusan pemerintahan; g) Unsur pengawas; h) Unsur kewilayahan; i) Unsur pemerintahan umum.

5.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN BENCANA

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pengelolaan Sampah
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Pelayanan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Penyusunan Profil Kependudukan

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Pembangunan Prasarana Pertanian
Pengembangan Prasarana Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Administrasi Tata Pemerintahan
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penataan Organisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran
Pembahasan Kerja Sama Daerah
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Layanan Administrasi DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
KEUANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KEPEGAWAIAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Mutasi dan Promosi ASN
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Pengembangan Kompetensi ASN
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Kompetensi Teknis
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Pendampingan dan Asistensi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN/BIDANG URUSAN/KEGIATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Ada beberapa penambahan program/kegiatan dimana menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi kinerja perangkat daerah. Persandingan antara APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025, maka dapat terlihat perubahan program pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 1 Jumlah Program pada RKPD 2025, APBD 2025 dan P.RKPD 2025

No	Bidang	Jumlah Program			Program Bertambah /Berkurang
		RKPD 2025	APBD 2025	P.RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	4	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	10	10	-
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	-
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	4	-
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	6	-
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	5	-
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	6	6	6	-

No	Bidang	Jumlah Program			Program Bertambah / Berkurang
		RKPD 2025	APBD 2025	P.RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	4	4	-
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1	-
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7	7	7	-
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	-
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	-
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	-
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2	-
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	-
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	7	7	-
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	-
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	-
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	-
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	-

No	Bidang	Jumlah Program			Program Bertambah / Berkurang
		RKPD 2025	APBD 2025	P.RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	4	-
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	-
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	2	-
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	5	-
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	3	-
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	-
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	7	7	-
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	-
30	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	-
31	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	-
32	PERENCANAAN	3	3	3	-
33	KEUANGAN	4	4	4	-
34	KEPEGAWAIAN	2	2	2	-
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	-
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	-
37	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	-
38	KECAMATAN	4	4	4	-
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	-
	JUMLAH	156	156	157	-

Sumber: Data diolah SIPD RI, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah program dari tahapan RKPD Tahun 2025 hingga tahapan Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak ada mengalami perubahan. Selanjutnya jika dilihat dari kegiatan dan sub

kegiatan, maka terdapat perubahan kegiatan dan sub kegiatan baru antara Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 2025, APBD 2025 dan P.RKPD 2025

No	Bidang	Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Kegiatan Bertambah/Berkurang	Sub Kegiatan Bertambah/Berkurang
		APBD 2025	P.RKPD 2025	APBD 2025	P.RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)	10=(6-5)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	14	14	127	127	0	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	22	22	108	108	0	0
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23	23	106	106	0	0
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	17	41	44	2	3
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	14	29	37	3	8
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14	14	46	46	0	0
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	16	16	32	32	0	0
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	19	19	40	40	0	0

No	Bidang	Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Kegiatan Bertambah/Berkurang	Sub Kegiatan Bertambah/Berkurang
		APBD 2025	P.RKPD 2025	APBD 2025	P.RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)	10=(6-5)
	PERLINDUNGAN ANAK						
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12	13	39	43	1	4
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	2	2	0	0
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13	13	34	37	0	3
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	14	28	28	0	0
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	11	34	34	0	0
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8	8	27	27	0	0
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14	14	36	36	0	0
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	10	38	38	0	0
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,	13	13	36	37	0	1

No	Bidang	Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Kegiatan Bertambah/Berkurang	Sub Kegiatan Bertambah/Berkurang
		APBD 2025	P.RKPD 2025	APBD 2025	P.RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)	10=(6-5)
	DAN MENENGAH						
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	11	12	34	35	1	1
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14	14	36	36	0	0
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	5	5	0	0
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2	2	5	5	0	0
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	6	12	12	0	0
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10	10	35	35	0	0
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4	4	8	8	0	0
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	17	17	43	43	0	0
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	8	8	0	0
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18	18	45	45	0	0
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20	20	40	40	0	0
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3	3	8	8	0	0

No	Bidang	Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Kegiatan Bertambah/Berkurang	Sub Kegiatan Bertambah/Berkurang
		APBD 2025	P.RKPD 2025	APBD 2025	P.RKPD 2025		
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)	10=(6-5)
	PERINDUSTRIAN						
30	SEKRETARIAT DAERAH	19	19	60	60	0	0
31	SEKRETARIAT DPRD	18	18	90	90	0	0
32	PERENCANAAN	13	13	57	57	0	0
33	KEUANGAN	13	13	75	75	0	0
34	KEPEGAWAIAN	11	11	28	28	0	0
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	2	2	2	0	0
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3	3	5	5	0	0
37	INSPEKTORAT DAERAH	11	11	39	39	0	0
38	KECAMATAN	11	11	40	42	0	2
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	12	38	38	0	0
	JUMLAH	452	459	1516	1538	7	22

Sumber: Data diolah SIPD RI, 2025

5.2 Pendanaan Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun tahunan untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025. Apabila dilihat dari jumlah pagu anggaran bidang urusan pemerintahan, terdapat pergeseran jumlah pagu anggaran pada setiap urusan pemerintahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Jumlah Pagu Anggaran pada APBD 2025 dan P.RKPD 2025

NO	BIDANG URUSAN	JUMLAH PAGU		PAGU BERTAMBAH/BERKURANG P.RKPD 2025
		APBD 2025	P. RKPD 2025	
1	2	3	4	5 (4-3)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.461.382.373.752	1.473.045.687.080	11.663.313.328
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	734.046.876.328	888.143.897.188	154.097.020.860
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	671.101.122.037	784.816.825.100	113.715.703.063
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	184.218.959.746	65.075.593.426	-119.143.366.320
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	38.658.286.992	44.965.740.508	6.307.453.516
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.058.122.393	14.420.046.893	-638.075.500
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.220.453.999	14.568.416.536	-652.037.463

NO	BIDANG URUSAN	JUMLAH PAGU		PAGU BERTAMBAH/BERKURANG P.RKPD 2025
		APBD 2025	P. RKPD 2025	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.789.904.763	14.825.464.932	35.560.169
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.289.865.410	9.581.199.343	-708.666.067
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	6.555.706.532	28.248.100.974	21.692.394.442
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	84.870.401.654	88.500.695.104	3.630.293.450
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.359.904.371	17.090.704.539	-269.199.832
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.002.773.702	22.208.087.316	-794.686.386
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.912.176.806	19.810.447.505	-101.729.301
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.054.022.789	15.445.033.913	391.011.124
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.749.143.772	19.264.022.455	3.514.878.683
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.751.449.884	9.535.184.034	-216.265.850
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	13.233.960.073	12.880.715.873	-353.244.200

NO	BIDANG URUSAN	JUMLAH PAGU		PAGU BERTAMBAH/BERKURANG P.RKPD 2025
		APBD 2025	P. RKPD 2025	
	PENANAMAN MODAL			
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.362.866.126	15.013.720.703	-349.145.423
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	333.127.998	235.642.663	-97.485.335
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	300.029.088	146.000.000	-154.029.088
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.170.654.860	4.824.128.760	-346.526.100
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.964.714.382	9.673.350.247	-291.364.135
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	328.827.765	295.539.112	-33.288.653
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.389.644.129	2.995.834.181	-393.809.948
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	45.602.857.690	40.026.835.388	-5.576.022.302
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	28.215.906.252	26.955.633.602	-1.260.272.650
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.922.214.300	1.676.436.570	-245.777.730
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.865.711.527	11.107.836.229	-757.875.298
30	SEKRETARIAT DAERAH	90.568.843.738	100.190.742.543	9.621.898.805
31	SEKRETARIAT DPRD	131.593.583.886	104.531.249.379	-27.062.334.507
32	PERENCANAAN	15.626.250.121	13.647.439.950	-1.978.810.171
33	KEUANGAN	949.216.658.802	943.089.214.422	-6.127.444.380
34	KEPEGAWAIAN	14.667.131.005	14.035.910.764	-631.220.241
35	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.166.120.974	982.087.319	-184.033.655
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.470.839.458	4.641.412.757	1.170.573.299

NO	BIDANG URUSAN	JUMLAH PAGU		PAGU BERTAMBAH/BERKURANG P.RKPD 2025
		APBD 2025	P. RKPD 2025	
37	INSPEKTORAT DAERAH	26.728.423.351	26.929.923.351	201.500.000
38	KECAMATAN	106.576.502.135	104.177.890.637	-2.398.611.498
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.045.952.688	18.786.366.788	-259.585.900
	JUMLAH TOTAL	4.831.372.365.278	4.986.389.058.084	155.016.692.806

Sumber: Data diolah SIPD RI, 2025

Berdasarkan hasil Analisis Perencanaan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 melalui aplikasi SIPD, diperoleh total kebutuhan anggaran pada perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 155.016.692.806,- dimana jika dilihat terdapat penambahan pagu anggaran dari sebelumnya (APBD 2025) Rp 4,831 triliun menjadi Rp 4,986 triliun (P.RKPD 2025) dengan tujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih.

Berdasarkan komposisi alokasi pendanaan tersebut, maka Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 telah memenuhi batasan Mandatory Spending urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kesehatan. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, dimana tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, alokasi anggaran bidang urusan pendidikan sebesar 30,06% lebih besar dari batasan 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Sedangkan alokasi anggaran bidang urusan kesehatan sebesar 16,32% lebih besar dari batasan 10% (sepuluh persen) dari APBD (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dengan demikian dapat disimpulkan, penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 telah memenuhi tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik.

5.3 Pendanaan Dukungan Prioritas Nasional Tahun 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 juga mendukung prioritas nasional untuk tahun 2025 sebagaimana tema RKP 2025 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) prioritas nasional adalah sebagai berikut.



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Gambar 5.1 Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Distribusi dukungan pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 terhadap Prioritas Nasional adalah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.4 Dukungan Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 Terhadap Prioritas Nasional

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PAGU INDIKATIF P. RKPD 2025	PERSEN TASE
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	2.024.246.774	0,041%
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7.563.101.440	0,152%
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	26.044.527.316	0,522%

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PAGU INDIKATIF P. RKPD 2025	PERSEN TASE
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	9.708.339.647	0,195%
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2.097.611.592	0,042%
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2.059.289.117	0,041%
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	196.082.093.654	3,932%
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	17.201.470.384	0,345%
		262.780.679.924	

Dari tabel di atas, dapat dicermati bahwa dukungan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 mendukung Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan atau prioritas nasional ke-7 (ketujuh) mengalokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp.196.082.093.654,- (3,93%). Dalam mendukung prioritas nasional ke-3 (ketiga) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, alokasi pendanaan sebesar Rp. 26.044.527.316,00 (0,52%). Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga mendukung seluruh prioritas nasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5.4 Pendanaan Dukungan Prioritas Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik yang Sehat dan Berkualitas
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya
3. Pembangunan Ekonomi yang Sehat, Berkualitas dan Inklusif
4. Pembangunan Lingkungan yang Sehat, Aman, Nyaman dan Berkelanjutan

Distribusi dukungan pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.5 Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF P. RKPD 2025	PERSEN TASE
1	Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik yang Sehat dan Berkualitas	2.189.019.203.308	43,90%
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1.493.914.073.637	29,96%
3	Pembangunan Ekonomi yang Sehat, Berkualitas dan Inklusif	666.563.755.884	13,37%
4	Pembangunan Lingkungan yang Sehat, Aman, Nyaman dan Berkelanjutan	636.892.025.255	12,77%
		4.986.389.058.084	100,00 %

Dari tabel di atas, dapat dicermati bahwa dukungan pendanaan pada Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 terhadap prioritas daerah pertama (Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Publik yang Sehat dan Berkualitas) sebesar Rp.2.189.019.203.308, Prioritas Daerah kedua (Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya) sebesar Rp.1.493.914.073.637, Prioritas Daerah ketiga (Pembangunan Ekonomi yang Sehat, Berkualitas dan Inklusif) sebesar Rp.666.563.755.884, kemudian Prioritas Daerah keempat (Pembangunan Lingkungan yang Sehat, Aman, Nyaman dan Berkelanjutan) sebesar Rp. 636.892.025.255.

5.5 Pendanaan Dukungan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terancam dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau bermartabat dari sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi makro pembangunan, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 sebesar 3,44%, dikategorikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 4,00% (2024). Walaupun demikian berbagai upaya terus ditingkatkan dan dilanjutkan sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Secara teknis, upaya penanggulangan kemiskinan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Dukungan Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1	Program Pengembangan UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Jamur Tiram)	25	Kecamatan Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Sibolangit	100.000.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Prizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Souvenir)	25	Kecamatan Lubuk Pakam, Tanjung Morawa dan Deli Tua	60.000.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala usaha Menjadi Usaha Kecil (Pembuatan Kue Kering dan Kue Basah)	25	Kecamatan Deli Tua, Galang, Bangun Purba, Namorambe	70.000.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala usaha Menjadi Usaha Kecil (Pembuatan Kristik)	25	Kecamatan hamparan Perak, Batang Kuis	70.000.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
		Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala usaha Menjadi Usaha Kecil (kerupuk ikan)	25	Kecamatan Deli Tua, Galang, Bangun Purba, Namorambe	70.000.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala usaha Menjadi Usaha Kecil (Pembuatan Produk Agrikultur)	25	Kecamatan hamparan Perak, Batang Kuis	70.000.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Laporan	Kabupaten Deli Serdang	104.080.020	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10 Jenis Dokumen	Kabupaten Deli Serdang	816.148.194	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	10 Layanan	Kabupaten Deli Serdang	439.549.440	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pendidikan							
	PROGRAM PENGOLAHAN PENDIDIKAN	A. Pengelolaan Pendidikan Non formal					Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
		1. Pengadaan Perlengkapan Pendidik Non Forma/Kesetaraan					Dinas Pendidikan
		a. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	42 Kelompok	Kabupaten Deli Serdang	298.093.152	APBD	Dinas Pendidikan
		b. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	42 Kelompok	Kabupaten Deli Serdang	298.093.152	APBD	Dinas Pendidikan
		c. Penyelenggaraan Paket A Setara SD	52 Kelompok	Kabupaten Deli Serdang	250.114.176	APBD	Dinas Pendidikan
		2. Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/ Kesetaraan					
		a. Pembangunan Kelompok Desa Vokasi	10 Lembaga/ 150 Orang	Kabupaten Deli Serdang	214.532.520	APBD	Dinas Pendidikan
		b. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	16 Lembaga/240 Orang	Kabupaten Deli Serdang	344.185.724	APBD	Dinas Pendidikan
		3. Penyediaan Biaya Operasional Personil Peserta Didik Non Formal dan Kesetaraan Bagi Mahasiswa Deli Serdan					Dinas Pendidikan
		a. Pemberian Bantuan Peralatan Sekolah Kepala Anak Persisir, Panti Asuhan	550 Orang	Kabupaten Deli Serdang	999.389.096	APBD	Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
		b. Beasiswa Inovasi Desa SATU Anak Kawan Pesisir Mengaji Deli Serdang	100 Orang	Kabupaten Deli Serdang	1.185.600.000	APBD	Dinas Pendidikan
		c. Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Deli Serdang	30 Orang	Kabupaten Deli Serdang	411.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
		B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Dinas Pendidikan
		1. Pengadaan Perlengkapan Siswa	2456 siswa	Kabupaten Deli Serdang			Dinas Pendidikan
		a. Pemberian Perlengkapan sekolah/alat tulis untuk siswa SD	12 Bulan	Kabupaten Deli Serdang	631.389.508	APBD	Dinas Pendidikan
		C. Pengelolaan Pendidikan SMP					Dinas Pendidikan
		1. Pengadaan Perlengkapan Siswa					Dinas Pendidikan
		a. Pemberian Perlengkapan sekolah/alat tulis untuk siswa SMP	14736 Siswa	Kabupaten Deli Serdang	505.591.208	APBD	Dinas Pendidikan
TIM Penggerak PKK							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
	PEMBINAAN DESA/KELURAHAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK PKK KATEGORI UP2K - PKK (USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PKK)	Bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang Melaksanakan Pembinaan, antara lain:	22 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan Setiap Kecamatan	Ditampung Oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang	APBD	Tim Pengerak PKK
		a. Pembentukan Kepengurusan Kelompok Khusus (Poksus) UP2K PKK dengan Penerbitan SK Oleh Kepala Desa dan Lurah					
		b. Menjelaskan cara pengisian buku Administrasi UP2K - PKK: 1. Buku Kas, 2. Buku daftar pinjaman, angsuran, iuran dan Simpanan UP2K -PKK 3. Buku Catatan Data dan Perkembangan UP2K - PKK					
		c. Menjelaskan cara Pembentukan Kelompok Pelaksana (Poklak) UP2K yang terdiri dari keluarga					

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
		d. Mengarahkan Peserta Kelompok pelaksanaan (Poklak) untuk meningkatkan kualitas hasil produksi dan cara pengemasan produk yang baik serta pemasarannya					
		e. Memfasilitasi pembuatan nomor induk berusaha (NIB) oleh Dinas Koperasi dan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Oleh Dinas Kesehatan					
	PEMBINAAN DESA/KELURAHAN PELAKSANAAN 10 PROGRAM POKOK PKK KATEGORI AMALKAN DAN KUKUHKAN HALAMAN ASRI, TERATUR, INDAH DAN NYAMAN (AKU HARINYA PKK)	Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan berbagai kegiatan yaitu :	22 Desa/Kelurahan	1 Desa/Kelurahan Setiap Kecamatan	Ditampung oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Deli serdang	APBD	Tim Pengerak PKK
		a. Melaksanakan Penyuluhan dan pembinaan pemanfaatan tanah					

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
		pekarangan untuk Ketahan Pangan Keluarga					
		b. Mengarahkan untuk mebuat umah pembibitan untuk berbagai macam sayuran, Bumbu sayuran, Bumbu dapur dan tanaman obat untuk dibagikan kepada masyarkat					
		c. mengarahkan agar memanfaatkan lahan kosong di setiap dusun untuk ditanami sayuran dan bumbu dapur					
		d. penyusunan pemanfaatan lahan pekarangan yang sempit dengan tanaman dalamm pot dan polybag					
		e. memberikan bantuan bibit tanaman buah dan bantuan benih/bibit sayur-sayuran dan tanaman obat serta polybag					
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER DANA	OPD
	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Memberikan Tali Asih kepada Bilal Jenazah dan penggali Kubur	Bilal Jenazah dan Peggali Kubur	Kecamatan	6.411.600.000	APBD	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Dinas Pertanian							
	Dinas Pertanian hanya mengalokasikan Bantuan Kepada Petani melalui kelompok tani yang sudah terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN)						Dinas Pertanian

Sumber : Data diolah Bappedalitbang, 2025

5.6 Dukungan Pendanaan Penanggulangan Pengangguran Tahun 2025

Ditengah guncangan perekonomian dunia, penguatan ekonomi nasional dan daerah diperkirakan akan berlanjut meski harus menjadi perhatian seiring peningkatan risiko global. Berdasarkan hasil evaluasi capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020 sampai dengan 2021 belum mencapai target yang telah di tetapkan dalam RPJMD. Begitu juga dibandingkan capaian tingkat pengangguran Sumatera Utara pada tahun 2022 yakni sebesar 6,16% dengan capaian Deli Serdang yang masih tinggi yakni sebesar 8,79% (2022).

Dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran diperlukan dukungan program kerja tahun 2025 untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang dapat menyentuh sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta mampu menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan terkini. Selain itu juga, perlu dilakukan pelatihan tenaga kerja yang mendukung kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Tabel 5.6 Program Penanggulangan Pengangguran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
DINAS KETENAGAKERJAAN			
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	668.303.708	DISNAKER
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	388.100.000	DISNAKER
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.240.993.476	DISNAKER
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	590.000.000	DISPERINDAG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	330.976.838	DINAS KOPERASI UKM
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.116.864.806	DINAS KOPERASI UKM
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	650,045,584	DINAS KOPERASI UKM
DINAS PERIKANAN			

NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.115.116.000	DINAS PERIKANAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.642.232.500	DINAS PERIKANAN
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	349.586.560	DINAS PERIKANAN
	TOTAL	9.442.173.888	

Sumber: Data diolah Bappedalitbang, 2025

5.7 Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Nasional Penanggulangan Stunting Tahun 2025

Meskipun tingkat konvergensi stunting Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 sudah cukup baik, namun mengingat stunting berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan juga menjadi salah satu prioritas daerah dalam RKPD tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Deli mengalokasikan dukungan program penanggulangan stunting seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7 Program Penanggulangan Stunting Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
	Dinas Kesehatan								
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Supervisi pemantauan status gizi & tumbuh kembang anak melalui PMBA	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	%	34 Puskesmas	32.981.516	BOK Kabupaten	Dinas Kesehatan
2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dalam Pengelolaan Posyandu	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	100	%	34 Puskesmas	32.981.516	BOK Kabupaten	Dinas Kesehatan
3	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Supervisi Aplikasi E-PPGBM	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi	100	%	34 Puskesmas	32.981.516	BOK Kabupaten	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGAR AN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
			gizi untuk penurunan stunting						
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Supervisi Pemantauan Pencatatan dan Pelaporan serta Pemberian Fe Pada Remaja Putri ke Puskesmas dan Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	%	34 Puskesmas	50.317.896	BOK Kabupaten	Dinas Kesehatan
5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Evaluasi dan Pembinaan Surveilans Gizi	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	100	%	34 Puskesmas	67.296.916	BOK Kabupaten	Dinas Kesehatan
6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	212500	Jiwa	Kabupaten Deli Serdang	96.390.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Catin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	550	Orang	Kabupaten Deli Serdang	89.509.172	APBD	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
	Dinas Pendidikan								
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Bimtek Parenting dalam Upaya Pencegahan Stunting satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	173	Orang Peserta Bimtek	Kabupaten Deli Serdang	101.431.130	APBD	Dinas Pendidikan
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta didik PAUD	Penyediaan/Pemberian makanan sehat bagi anak didik PAUD yang beda di lokus stunting	Jumlah Peserta Didik di desa Lokus stunting yang mendapatkan Makanan sehat	5625	Anak didik Paud	16 Kecamatan, 70 Desa, 173 PAUD di Kabupaten Deli Serdang	590.625.000	APBD	Dinas Pendidikan
	Dinas Sosial								
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, Honorarium Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaksana PKH Kab / Kota, Rapat Koordinasi dan Pelatihan / Penguatan Kapasitas SDM PKH	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	37518	Keluarga	Kabupaten Deli Serdang	821.200.252	APBD	Dinas Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
2	Bantuan Sosial PKH	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, Honorarium Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaksana PKH Kab / Kota, Rapat Koordinasi dan Pelatihan / Penguatan Kapasitas SDM PKH	Terpenuhinya PKH yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab / Kota	38152	Keluar ga	Kabupate n Deli Serdang	38.058.775.000	APBN	Dinas Sosial
3	Sembako BPNT	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, Honorarium Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaksana PKH Kab / Kota, Rapat Koordinasi dan Pelatihan / Penguatan Kapasitas SDM PKH	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	57960	Keluar ga	Kabupate n Deli Serdang	11.592.000.000	APBN	Dinas Sosial
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang									
1	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Tanjung Rejo	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Percut Sei Tuan	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Jaharun A	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Galang	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Petungguhen	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Galang	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Kelurahan Petapahan	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	9	Unit	Lubuk Pakam	127.935.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Karang Gading	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Labuhan Deli	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Telaga Tujuh	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Labuhan Deli	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Pembangunan Tangki Septik Individual/	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Sibolangit	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
		Komunal Desa Buluh Awar							
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Ketangkueh	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Sibolangit	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Puang Aja	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Sibolangit	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Sala Bulan	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Sibolangit	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Kota Rantang	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Hampan Perak	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Paluh Kurau	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Hampan Perak	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Tandem Hilir II	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Hampan Perak	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Bulu Cina	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Hampan Perak	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Marjandi Pematang	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Gunung Meriah	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Pematang Lalang	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Percut Sei Tuan	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Penungkiren	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	STM Hilir	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Lau Barus Baru	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	STM Hilir	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Sei Tuan	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Pantai Labu	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Sialang	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Bangun Purba	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Silebolebo	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Kutalimbaru	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Sugiharjo	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14	Unit	Batang Kuis	199.010.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Marindal I	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	12	Unit	Patumbak	170.580.000	Dana APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Binjai Bakung (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	68	Unit	Pantai Labu	680.000.000	Dana DAK	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	65	Unit	Pantai Labu	650.000.000	Dana DAK	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUAR AN	SATUA N	LOKASI	ANGGARAN	SUMBER ANGGAR AN	PELAKSANA
		Komunal Desa Paluh Sibaji (DAK)							
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Kelambir Lima Kebon (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	64	Unit	Hampan Perak	640.000.000	Dana DAK	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Namu Tualang (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	69	Unit	Biru-Biru	690.000.000	Dana DAK	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Purwodadi (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	72	Unit	Sunggal	720.000.000	Dana DAK	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Emplasmen Kuala Namu (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	64	Unit	Beringin	640.000.000	Dana DAK	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		Pembangunan Tangki Septik Individual/ Komunal Desa Wonosari (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	76	Unit	Tanjung Morawa	760.000.000	Dana DAK	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Sumber: Data diolah Bappedalitbang, 2023

5.8 Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Nasional Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal merupakan bagian dari pelayanan dasar urusan wajib yang berhak diperoleh seluruh warga negara secara minimal. Dalam penerapannya tidak terlepas dari berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi hingga pencapaiannya pada beberapa bidang belum maksimal. Diperlukan sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan, dan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Perangkat Daerah terkait.

Penerapan SPM menjadi sangat urgent dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka dasar/pokok untuk kesejahteraan

masyarakat dapat terbangun bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Dalam

menerapkan SPM, perangkat daerah diberikan koridor berupa tugas dan fungsi yang menggambarkan cakupan program/kegiatan yang harus dijalankan dengan dukungan pendanaan dalam RKPD tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.8 Dukungan Pendanaan Program terhadap Pencapaian SPM
Tahun 2025**

NO	JENIS SPM	PROGRAM	PAGU	OPD
1	BIDANG PENDIDIKAN		101.979.408.212,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	101.979.408.212,00	DINAS PENDIDIKAN
2	BIDANG KESEHATAN		19.721.154.439,00	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.721.154.439,00	DINAS KESEHATAN
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		66.413.183.535,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	46.494.274.964,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	19.918.908.571,00	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	JENIS SPM	PROGRAM	PAGU	OPD
4	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		4.779.741.890,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.779.741.890,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5	BIDANG PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		17.117.316.259,00	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.203.234.306,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.276.208.913,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.637.873.040,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
6	BIDANG SOSIAL		827.339.040,00	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	411.057.240,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	416.281.800,00	DINAS SOSIAL
		JUMLAH TOTAL	210.838.143.375,00	

Sumber: SIPD-RI, 2025

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan dukungan pendanaan terhadap pencapaian SPM tahun 2025 dengan harapan dapat memenuhi SPM terutama penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM tersebut. Dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 sudah mengalokasikan dukungan terhadap pencapaian SPM pada Bidang Pendidikan sebesar Rp.101.979.408.212,00, Bidang Kesehatan sebesar Rp. 19.721.154.439,00, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.66.413.183.535,00, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.4.779.741.890,00, Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum,

Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.17.117.316.259,00, dan Bidang Sosial sebesar Rp.827.339.040,00.

Selain itu, dalam mencapai target SPM dibutuhkan dukungan perangkat daerah lain mengingat ada pencapaian SPM yang bersinergi antar perangkat daerah sehingga dapat menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada menciptakan kesejahteraan masyarakat.

BAB. VI Penutup

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari RKPD Tahun 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Dalam penyusunannya telah menyelaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Perubahan RKPD Tahun 2025 dilandasi oleh hasil evaluasi kinerja, perubahan kondisi dan prioritas pembangunan serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Serta (mengingat Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025), maka dibutuhkan Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 guna menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program unggulan kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden.

Selanjutnya, perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran pemerintah dan pelayanan umum, menyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

produktif, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, dalam perwujudan pembangunan daerah, tentunya akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik yang berasal dari dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan pengendalian untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan atas implementasi pembangunan. Aktivitas pengendalian juga dilakukan untuk memastikan kebermanfaatan pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat. Pengendalian pembangunan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan, baik pada tahapan perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan. Efektivitas pengendalian pembangunan sangat ditentukan oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah akses, dan dibagipakaikan melalui pengelolaan satu data dan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.

Akhirnya Perubahan RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah atasan (Provinsi dan Pusat). Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.